



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 42 TAHUN
2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan pemerintah pusat;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Kabupaten Tangerang Tahun 2022;

c. bahwa . . .

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah apabila hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0122);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2022 merupakan tahun keempat RPJMD Tangerang Tahun 2019-2023 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Provinsi Banten.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (3) RKPD Tahun 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Daerah Tahun 2019-2022.
- (4) Sistematika RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V . . .

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

- (5) Uraian RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020.....	5
1.5 Dasar Pertimbangan Perubahan	7
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021 TRIWULAN II	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Triwulan II	8
2.2 Permasalahan Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II	11
2.3 Solusi	16
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	17
3.1 Kerangka Ekonomi Daerah	17
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah.....	17
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021.....	38
3.2 Kebijakan Keuangan Daerah.....	39
3.2.1 Kondisi Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka	39
3.2.2 Arah Kebijakan Perubahan Belanja Daerah.....	42
3.2.3 Arah Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah.....	46

BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	47
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	47
4.2	Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2022	59
4.2.1	Keselarasn Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang	59
4.2.2	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Banten terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2022	60
4.2.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	61
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	79
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	124
BAB VII	PENUTUP.....	152

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Sampai dengan Triwulan II.....	8
Tabel 2.3 Realisasi Keuangan dan Fisik Belanja Langsung Sampai dengan Triwulan II.....	10
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang Tahun 2021	17
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Wajib KTP di Kabupaten Tangerang Tahun 2021	18
Tabel 3.3 Tabel rasio Kelamin dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021	19
Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2018-2021	23
Tabel 3.5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang (miliar rupiah), 2017-2021.....	26
Tabel 3.6 PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha tahun 2018-2021 (miliar rupiah)	27
Tabel 3.7 Kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang Atas dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2018-2021	28
Tabel 3.8 Perkembangan Inflasi di Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2015-2020.....	30
Tabel 3.9 Target Makro Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022.....	39
Tabel 3.10 Proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2022 ..	42
Tabel 3.11 Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2022	45
Tabel 3.12 Proyeksi Anggaran Perubahan Pembiayaan Tahun 2022	46
Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	48
Tabel 4.2 Hubungan Misi, Tujuan dan Strategi Pembangunan	50
Tabel 4.3 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2022	55
Tabel 4.4 Capaian dan target Program Unggulan Tahun 2019-2023	64

Tabel 5.1 Rekapitulasi Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Berdasarkan Perangkat Daerah	81
Tabel 5.2 Rekapitulasi Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Berdasarkan Urusan dan Program	86
Tabel 6.1 Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2022	124
Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tangerang Tahun 2022	125
Tabel 6.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2022	126
Tabel 6.4 Target Indikator Kinerja Berdasarkan Urusan	137

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2021.....	19
Gambar 3.2 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021 (dalam jiwa).....	20
Gambar 3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021	21
Gambar 3.4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2016-2021	24
Gambar 3.5 Perkembangan Inflasi di Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2015-2020.....	30
Gambar 3.6 Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten (2017-2021).....	31
Gambar 3.7 Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Konstan di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten (2017-2021).....	32
Gambar 3.8 Gini Rasio Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020.....	33
Gambar 3.9 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2022.....	34
Gambar 3.10 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, provinsi Banten dan Nasional Tahun 2013-2021	35
Gambar 3.11 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2022.....	36
Gambar 3.12 Rata-rata Lama Sekolah Kab.tangerang Tahun 2016-2021.....	37
Gambar 3.13 Harapan lama Sekolah Kab.tangerang Tahun 2016-2022.....	37
Gambar 3.14 Angka Harapan Hidup Penduduk di Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2021	37
Gambar 3.15 Angka Harapan Hidup Penduduk di kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021	38
Gambar 4.2 Penyelarasan Tema Pembangunan RKP 2022	59
Gambar 4.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Banten Tahun 2022.....	60

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan menyelaraskan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan.

Penyusunan Perubahan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran. Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2022, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2022.

Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih/kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah. Perubahan RKPD meliputi perubahan:

- a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- b. target sasaran pembangunan Daerah;
- c. penambahan dan/atau pengurangan target indikator program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nimir 166, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas kepada ASN, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
17. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Provinsi Banten (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 21);
22. Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.120-Huk/2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1611);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

- Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 09);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0119);
 28. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022;
 29. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
 30. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah melakukan penyesuaian terhadap RKPD Kabupaten Tangerang dari hasil evaluasi tahun berjalan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan pada RKPD 2022 dan keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran Lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Adapun tujuan disusunnya dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah untuk :

1. Acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2022 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD- P) Tahun 2022;
2. Sebagai acuan dalam pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2022

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022

Penyajian RKPD disusun menurut sistematika sebagaimana dijelaskan dalam pasal 349 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dibawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan dokumen Perubahan RKPD, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022, sistematika dokumen perubahan RKPD dan dasar pertimbangan perubahan disertai gambaran perubahan kerangka ekonomi

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN TANGERANG TRIWULAN II TAHUN 2022

Menjelaskan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan 2 tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan perubahan kerangka ekonomi dan perubahan kebijakan keuangan daerah yang meliputi perubahan kebijakan pendapatan dan keuangan

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD triwulan kedua dan target yang direncanakan untuk penuntasan target RPJMD Tahun 2013-2021 Tahun dimana tahun 2022 merupakan tahun terakhir RPJMD, sehingga dapat digambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang mendesak tingkat daerah dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam Tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan perubahan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan sampai triwulan kedua tahun 2022. Program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yg paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Ringkasan penjelasan hal-hal penting atas tahapan-tahapan sistematika penyajian pada bab-bab sebelumnya sehingga memberikan gambaran perencanaan tahunan daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022.

1.5 Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan RKPD Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pembangunan Kabupaten Tangerang dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa yang menjadi dasar perubahan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap keuangan daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan;
2. Perubahan kerangka pendanaan daerah baik yang bersumber dari dana Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer antara lain:
 - a. Perubahan target Pendapatan Asli Daerah; dan
 - b. Perubahan target Dana Transfer.
3. Perkembangan dilapangan yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran antar kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, serta refocusing anggaran.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN TANGERANG
TRIWULAN II TAHUN 2022

Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2022 menguraikan beberapa hal penting harus dipertimbangkan yaitu tentang evaluasi pelaksanaan RKPD dan permasalahan pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2022 mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dan dokumen RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2022 sebagai bahan acuan dalam mengukur pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Triwulan II

Hasil evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2022 sampai dengan triwulan II (per 23 Mei 2022) memperlihatkan belum maksimalnya penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II.

Realisasi Pendapatan Kabupaten Tangerang sampai dengan Triwulan II bila dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022 sebesar 34,20 %, sedangkan untuk belanja daerah jika dibandingkan dengan Belanja Daerah pada Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022 sebesar 22,43 %.

Tabel 2.1
Realisasi APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2022 sampai dengan
Triwulan II

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	
			TW.I	%
	PENDAPATAN			
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.583.428.104.592,00	883.478.872.496,00	34,20%
	Hasil Pajak Daerah	1.961.053.392.906,00	753.424.407.310,00	38,42%
	Hasil Retribusi Daerah	79.785.396.662,00	10.375.339.007,00	13,00%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	53.789.023.713,00	0,00	0,00%
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	488.800.291.311,00	119.679.126.179,00	24,48%
	PENDAPATAN TRANSFER	3.154.266.365.989,00	650.409.485.740,00	20,62%

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	
			TW.I	%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.449.768.183.000,00	459.602.144.175,00	18,76%
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	704.498.182.989,00	190.807.341.565,00	27,08%
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	9.718.384,00	0,00%
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan	0,00	9.718.384,00	0,00%
	JUMLAH PENDAPATAN	5.737.694.470.581,00	1.533.898.076.620,00	26,73%
	BELANJA DAERAH			
	BELANJA OPERASI	4.163.674.254.397,00	1.067.686.632.962,00	25,64%
	Belanja Pegawai	2.163.930.782.176,00	699.732.102.888,00	32,34%
	Belanja Barang dan Jasa	1.713.306.992.921,00	334.266.130.074,00	19,51%
	Belanja Hibah	280.388.479.300,00	33.688.400.000,00	12,01%
	Belanja Bantuan Sosial	6.048.000.000,00	0,00	0,00%
	BELANJA MODAL	1.165.681.312.343,00	72.540.028.425,00	6,22%
	Belanja Modal Tanah	134.294.460.679,00	2.214.556.000,00	1,65%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.496.102.737,00	7.848.724.808,00	4,66%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	392.255.955.567,00	8.333.323.077,00	2,12%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	445.267.859.292,00	54.093.094.540,00	12,15%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.366.934.068,00	50.330.000,00	0,20%
	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000,00	24.912.325.400,00	49,82%
	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	24.912.325.400,00	49,82%
	BELANJA TRANSFER	631.138.903.841,00	182.752.401.268,00	28,96%
	Belanja Bagi Hasil	184.734.548.541,00	107.340.168.324,00	58,11%
	Belanja Bantuan Keuangan	446.404.355.300,00	75.412.232.944,00	16,89%
	JUMLAH BELANJA DAERAH	6.010.494.470.581,00	1.347.891.388.055,00	22,43%
	SURPLUS / (DEFISIT)	-272.800.000.000,00	186.006.688.565,00	-68,18%
	PEMBIAYAAN DAERAH			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	300.000.000.000,00	0,00	0,00%
	Sisa Lebih Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	300.000.000.000,00	0,00	0,00%
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.200.000.000,00	27.199.297.110,00	100,00%
	Penyertaan Modal Daerah	27.200.000.000,00	27.199.297.110,00	100,00%
	PEMBIAYAAN NETTO	327.200.000.000,00	27.199.297.110,00	8,31%
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	54.400.000.000,00	158.807.391.455,00	0,00%

Adapun realisasi anggaran belanja setiap Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan dan Fisik Belanja Langsung sampai dengan
Triwulan II

No	Perangkat Daerah	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		PAGU	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	1.704.008.120.620,00	321.627.573.114,00	18,87%	24,87%
2	Dinas Kesehatan	1.180.564.953.692,00	288.185.195.067,00	24,41%	30,41%
3	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	301.733.517.950,00	37.387.470.982,00	12,39%	18,39%
4	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	250.097.423.701,00	7.199.642.103,00	2,88%	8,88%
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33.715.258.326,00	10.548.213.840,00	31,29%	37,29%
6	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman	363.367.818.239,00	12.671.518.100,00	3,49%	9,49%
7	Satuan Polisi Pamong Praja	20.116.697.630,00	7.654.780.530,00	38,05%	44,05%
8	Dinas Sosial	21.815.635.150,00	4.725.334.533,00	21,66%	27,66%
9	Dinas Tenaga Kerja	17.855.456.494,00	5.392.289.503,00	30,20%	36,20%
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.599.273.124,00	3.681.170.852,00	34,73%	40,73%
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	87.338.523.808,00	30.327.807.070,00	34,72%	40,72%
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.262.133.591,00	6.523.491.012,00	33,87%	39,87%
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	33.135.833.150,00	8.235.566.494,00	24,85%	30,85%
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	36.614.048.567,00	7.307.305.002,00	19,96%	25,96%
15	Dinas Perhubungan	62.811.332.530,00	21.283.962.268,00	33,89%	39,89%
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	56.973.603.676,00	13.950.616.197,00	24,49%	30,49%
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	14.939.571.059,00	4.905.613.914,00	32,84%	38,84%
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.889.748.853,00	7.306.091.093,00	33,38%	39,38%
19	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	52.225.737.740,00	22.274.382.729,00	42,65%	48,65%
20	Dinas Perpustakaan dan Arsip	15.181.167.751,00	5.696.151.998,00	37,52%	43,52%
21	Dinas Perikanan	17.612.924.973,00	5.061.794.138,00	28,74%	34,74%
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	33.574.477.032,00	11.611.338.158,00	34,58%	40,58%
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.312.698.280,00	6.158.367.226,00	27,60%	33,60%
24	Sekretariat Daerah	134.161.152.027,00	35.795.873.286,00	26,68%	32,68%
25	Sekretariat DPRD	123.314.235.166,00	30.497.638.948,00	24,73%	30,73%
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28.086.421.771,00	6.795.364.470,00	24,19%	30,19%
27	Badan Pendapatan Daerah	88.161.745.817,00	11.718.161.030,00	13,29%	19,29%
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	35.226.173.929,00	10.635.208.102,00	30,19%	36,19%
29	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	681.138.903.841,00	207.664.726.668,00	30,49%	36,49%
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25.496.712.660,00	7.736.486.498,00	30,34%	36,34%
31	Inspektorat Kabupaten	30.742.446.974,00	9.646.342.268,00	31,38%	37,38%
32	Kecamatan Tigaraksa	19.851.687.700,00	7.212.838.043,00	36,33%	42,33%
33	Kecamatan Cikupa	20.876.530.536,00	6.955.625.458,00	33,32%	39,32%

No	Perangkat Daerah	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	
		PAGU	Realisasi	%	Realisasi
34	Kecamatan Panongan	16.102.539.932,00	6.266.542.610,00	38,92%	44,92%
35	Kecamatan Curug	31.459.636.554,00	13.078.381.559,00	41,57%	47,57%
36	Kecamatan Legok	15.045.044.716,00	5.976.624.714,00	39,72%	45,72%
37	Kecamatan Pasar Kemis	37.150.105.528,00	15.564.273.095,00	41,90%	47,90%
38	Kecamatan Balaraja	13.751.977.324,00	5.279.499.575,00	38,39%	44,39%
39	Kecamatan Kresek	10.286.445.790,00	3.598.748.742,00	34,99%	40,99%
40	Kecamatan Kronjo	12.027.086.220,00	4.888.729.837,00	40,65%	46,65%
41	Kecamatan Mauk	17.295.345.736,00	6.973.361.031,00	40,32%	46,32%
42	Kecamatan Rajeg	16.727.984.283,00	6.598.863.791,00	39,45%	45,45%
43	Kecamatan Sepatan	15.030.743.726,00	5.644.213.527,00	37,55%	43,55%
44	Kecamatan Teluknaga	17.426.493.625,00	8.462.368.116,00	48,56%	54,56%
45	Kecamatan Cisoka	12.977.545.942,00	4.911.760.316,00	37,85%	43,85%
46	Kecamatan Pakuhaji	16.273.563.660,00	5.489.499.166,00	33,73%	39,73%
47	Kecamatan Kosambi	24.667.595.534,00	7.418.780.111,00	30,08%	36,08%
48	Kecamatan Pagedangan	18.253.706.087,00	5.696.247.920,00	31,21%	37,21%
49	Kecamatan Jambe	10.690.257.519,00	4.107.623.727,00	38,42%	44,42%
50	Kecamatan Jayanti	9.810.220.486,00	3.745.865.099,00	38,18%	44,18%
51	Kecamatan Kemiri	10.734.715.398,00	3.687.465.514,00	34,35%	40,35%
52	Kecamatan Sukadiri	11.367.928.810,00	2.575.730.755,00	22,66%	28,66%
53	Kecamatan Cisauk	17.161.324.337,00	7.187.959.522,00	41,88%	47,88%
54	Kecamatan Sepatan Timur	11.765.517.683,00	3.530.641.854,00	30,01%	36,01%
55	Kecamatan Sindang Jaya	10.405.802.681,00	3.430.215.052,00	32,96%	38,96%
56	Kecamatan Kelapa Dua	34.717.837.303,00	11.342.783.526,00	32,67%	38,67%
57	Kecamatan Solear	9.589.796.562,00	2.828.706.001,00	29,50%	35,50%
58	Kecamatan Mekar Baru	10.249.437.080,00	4.413.923.540,00	43,07%	49,07%
59	Kecamatan Sukamulya	10.685.694.210,00	2.730.017.715,00	25,55%	31,55%
60	Kecamatan Gunung Kaler	9.617.883.778,00	4.219.639.225,00	43,87%	49,87%
61	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	14.420.273.720,00	3.868.981.721,00	26,83%	32,83%
Total		6.010.494.470.581,00	1.347.891.388.055,00	22,43%	37,52%

2.2 Permasalahan Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II

Hasil evaluasi APBD Kabupaten Tangerang sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2022 terdapat permasalahan antara lain :

1. Penggunaan Aplikasi SIPD pada tahap penatausahaan belum efektif sehingga masih menggunakan kembali Aplikasi Simral yang menyebabkan perlu dilakukannya input ulang semua transaksi yang dilakukan pada aplikasi Simral ke SIPD, sehingga menghambat proses pencairan anggaran
2. Terbitnya regulasi dari Pusat untuk menyesuaikan nomenklatur Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan diterbitkannya Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Provinsi Banten kepada Kabupaten/Kota sehingga perlu dilakukan perubahan penjabaran.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh OPD yang kinerjanya belum maksimal pada Triwulan II adalah sebagai berikut :

NO	BIDANG/URUSAN	CAPAIAN KINERJA	ALASAN
1	PENDIDIKAN	24,87	Adanya perubahan dan penyesuaian juknis terkait belanja DAK sehingga baru bisa diserap setelah penyesuaian pergeseran belanja diantaranya terdapat dalam program 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dan 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN yang meliputi Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Sekolah Menengah, Pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan.
2	KESEHATAN	30,41	Anggaran yang sudah dicairkan adalah sesuai jadwal pencairan dan sesuai dengan kebutuhan.
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	18,39	Pelaksanaan kegiatan fisik konstruksi pada Jalan (Program Penyelenggaraan jalan/Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota/sub kegiatan pembangunan jalan) Konstruksi SDA (Program Pengelolaan Sumber Daya Air/ kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota/Sub kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai dan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah/ sub kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan masih dalam proses tender direncanakan pelaksanaan pekerjaan di bulan juni 2022 dan selesai di bulan oktober 2022 sedangkan realisasi penyerapannya sampai saat ini yaitu untuk gaji dan tunjangan, pemeliharaan rutin jalan dan SDA, kegiatan rutin pada bidang binamarga/SDA/perencanaan teknis dan rutin pada Program Penunjang Urusan Kabupaten/kota (Alat tulis kantor, Tagihan listrik, belanja cetak, Belanja makan dan minum rapat, perjalanan dinas dan rapat forum OPD).
4	PERKIM	9,49	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ,1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN ,1.03.07.2.01

NO	BIDANG/URUSAN	CAPAIAN KINERJA	ALASAN
			<p>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota. pada kegiatan fisik konstruksi (Paving, sanitasi, SAB, Spal dll) terdapat kesalahan kode rekening belanja yang berdampak tidak dapat dilaksanakannya kegiatan-kegiatan tersebut menunggu arahan dari bpkad dan perubahan APBD-P sehingga berdampak pada penyerapan anggaran pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pemakaman.</p>
5	DUKCAPIL	39,87	<p>Anggaran yang sudah dicairkan adalah sesuai jadwal pencairan dan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>Terdapat belanja Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp 7.500.000 dan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp 6.000.000 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tidak dicairkan karena anggaran tersebut tidak diperlukan dan akan dialihkan anggaran kas nya ke Triwulan IV.</p>
6	DPMPD	30,85	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat beberapa kegiatan yang direncanakan pada Triwulan I dan pelaksanaannya digeser ke Triwulan II belum seluruhnya dilaksanakan pada bulan Mei dan akan dilaksanakan pada Bulan Juni 2022, antara lain : 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3. Terdapat alokasi dana hibah kepada KPM yang belum tersalurkan

NO	BIDANG/URUSAN	CAPAIAN KINERJA	ALASAN
			<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</p> <p>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>Kendala : kesalahan Kode rekening Pada Perjalanan dinas luar daerah</p>
7	KOPERASI DAN UMKM	38,84	<p>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</p> <p>KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL</p> <p>Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</p> <p>Kendala : 1 kali pameran luar daerah pada TW1 dilakukan pergeseran jadwal mengingat kondisi Pandemi Covid-19, sehingga terjadi pergeseran anggaran sebesar Rp.129,631,500 ke TW3 yang akan dilaksanakan di bulan agustus 2022</p>
8	SEKERTARIAT DPRD	30,73	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sudah terlaksana 2 kegiatan (SKPD & Renstra), 5 kegiatan lainnya dilaksanakan di triwulan III dan IV 2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tertunda karena sedang dalam proses tender untuk pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya

NO	BIDANG/URUSAN	CAPAIAN KINERJA	ALASAN
			<p>4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (pengadaan mebel) sedang dalam proses pemesanan di sistem e catalog</p> <p>5. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</p> <p>1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD belum dilaksanakan karena belum adanya harmonisasi dari raperda eksekutif dan belum adanya surat pembahasan dari eksekutif</p> <p>2. Kegiatan Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (reses) tertunda karena prosedur dan mekanisme pengadaan belanja mamin belum di koordinasikan dengan inspektorat dan ULP</p>
9	SEKRETARIAT DAERAH	32,68	<p>1. Pelaksanaan Kegiatan baru dilaksanakan pada Triwulan ke II dan III</p> <p>2. Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dan masih menunggu proses pencairan</p> <p>3. Beberapa Item Belanja Modal di E-Catalog LPSE belum tersedia, sehingga belum dapat dilaksanakan Proses E-Purchasing</p> <p>4. Beberapa kegiatan dalam Proses Tender Umum</p>
10	PERENCANAAN	35,66	<p>Anggaran yang sudah dicairkan adalah sesuai jadwal pencairan dan sesuai dengan kebutuhan.</p>
11	KEUANGAN	19,29	<p>Penyerapan anggaran sudah 84% dari anggaran kas yang sudah ditetapkan. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor masih terdapat proses pengadaan barang pada e-catalog</p>

2.3 Solusi

Dalam mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Koordinasi kepada Kemendagri untuk mencari solusi dalam pemanfaatan aplikasi Simral dan kepada BPPT untuk aplikasi Simral; dan
2. Menyesuaikan target kinerja pada saat Perubahan APBD Tahun 2022

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. KERANGKA EKONOMI DAERAH

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

3.1.1.1. Demografi

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 berjumlah 3.293.533 jiwa, jiwa yang terdiri dari 1.684.328 jiwa penduduk laki-laki dan 1.609.205 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduknya sebesar 3.432,16 per km².

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	146,275	137,746	284,021
2	5 – 9	148,967	141,770	290,737
3	10 – 14	139,179	130,536	269,715
4	15 – 19	137,425	130,133	267,558
5	20 -24	143,119	139,957	283,076
6	25 – 29	152,564	149,225	301,789
7	30 – 34	152,880	145,420	298,300
8	35 – 39	143,164	137,746	280,910
9	40 – 44	132,067	131,918	263,985
10	45 – 49	116,764	113,915	230,679
11	50 – 54	95,548	87,004	182,552
12	55 – 59	70,498	62,872	133,370
13	60 – 64	48,268	43,392	91,660
14	65 – 69	31,698	28,409	60,107
15	70 – 74	14,386	15,231	29,617
16	75+	11,526	13,931	25,457
	Jumlah	1,684,328	1,609,205	3,293,533

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, Tahun 2022

Menurut data BPS tahun 2021 dibandingkan sensus sebelumnya, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2021 mengalami penambahan sekitar 47.914 jiwa, dengan jumlah 3.293.533 jiwa, sedangkan berdasarkan data DKB (Data Konsolidasi Bersih) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semester II tahun 2021, jumlah

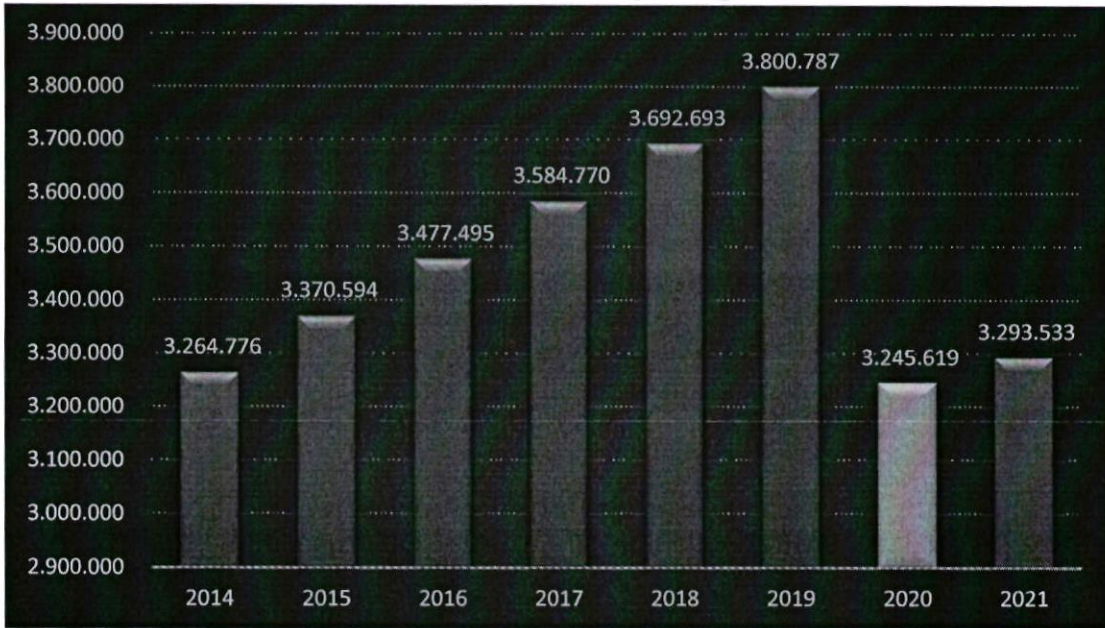
penduduk yang ber-NIK Kabupaten Tangerang berjumlah Rp. 3.185.552 jiwa, dengan jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 2.295.725 jiwa.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Wajib KTP di Kabupaten Tangerang Tahun 2021

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BALARAJA	43,861	42,949	86,810
2	JAYANTI	24,624	24,135	48,759
3	TIGARAKSA	55,789	54,800	110,589
4	JAMBE	18,513	18,144	36,657
5	CISOKA	33,114	31,983	65,097
6	KRESEK	25,240	25,108	50,348
7	KRONJO	22,253	22,874	45,127
8	MAUK	32,245	31,266	63,511
9	KEMIRI	17,448	17,221	34,669
10	SUKADIRI	23,313	22,648	45,961
11	RAJEG	62,472	60,380	122,852
12	PASAR KEMIS	94,480	93,186	187,666
13	TELUKNAGA	59,019	57,495	116,514
14	KOSAMBI	40,757	40,094	80,851
15	PAKUHAJI	45,104	43,049	88,153
16	SEPATAN	39,182	37,771	76,953
17	CURUG	63,076	62,677	125,753
18	CIKUPA	75,589	73,421	149,010
19	PANONGAN	44,331	43,465	87,796
20	LEGOK	42,632	41,393	84,025
21	PAGEDANGAN	38,030	37,368	75,398
22	CISAUK	31,183	30,472	61,655
23	SUKAMULYA	25,989	25,600	51,589
24	KELAPA DUA	62,181	63,926	126,107
25	SINDANG JAYA	32,734	31,692	64,426
26	SEPATAN TIMUR	37,509	35,615	73,124
27	SOLEAR	34,174	32,955	67,129
28	GUNUNG KALER	19,394	19,446	38,840
29	MEKAR BARU	15,128	15,228	30,356
	JUMLAH	1,159,364	1,136,361	2,295,725

Sumber : DKB Tahun 2021, Disdukcapil Kabupaten Tangerang

Gambar 3.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2021



Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2022

Tabel 3.3 Tabel Rasio Kelamin dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan
1	Cisoka	98,285	111	3,642.88
2	Solear	97,880	107	3,374.01
3	Tigaraksa	159,539	104	3,273.27
4	Jambe	52,319	106	2,010.72
5	Cikupa	208,208	105	4,878.35
6	Panongan	134,311	105	3,845.15
7	Curug	175,690	103	6,409.70
8	Kelapa Dua	169,264	100	6,942.74
9	Legok	120,502	105	3,430.17
10	Pagedangan	109,164	104	2,389.23
11	Cisauk	93,924	105	3,382.21
12	Pasar Kemis	277,214	104	10,694.98
13	Sindang Jaya	92,628	103	2,493.35
14	Balaraja	120,152	105	3,580.21
15	Jayanti	65,717	104	2,750.82
16	Sukamulya	70,325	104	2,610.43
17	Kresek	68,760	104	2,647.67
18	Gunung Kaler	51,421	103	1,735.44
19	Kronjo	62,366	100	1,410.04
20	Mekar Baru	41,932	103	1,760.37
21	Mauk	86,348	105	1,679.27
22	Kemiri	48,829	104	1,493.24
23	Sukadiri	64,567	105	2,674.69
24	Rajeg	197,619	106	3,680.06
25	Sepatan	119,308	107	6,888.45

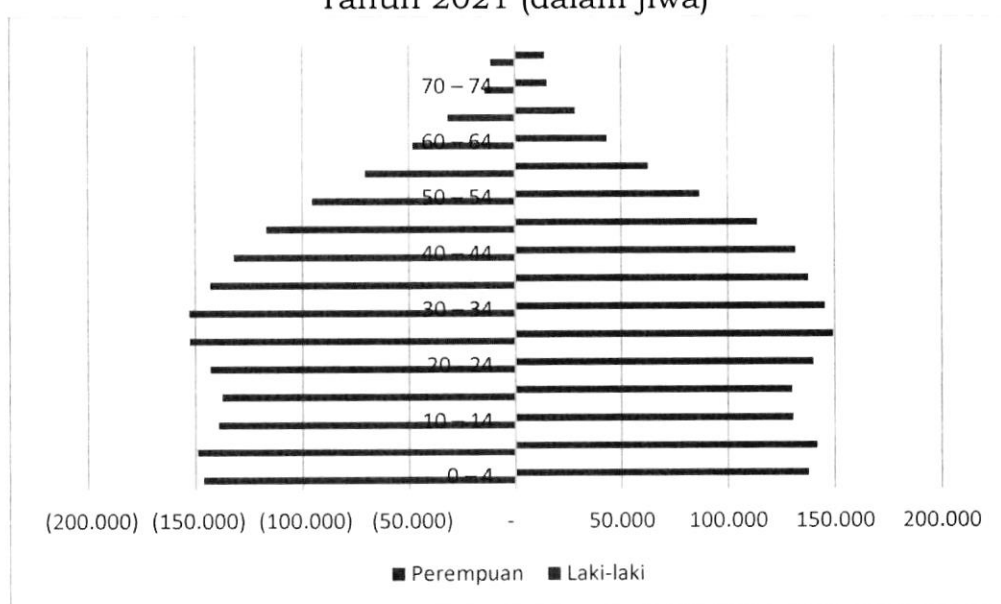
No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan
26	Sepatan Timur	108,186	107	5,921.51
27	Pakuhaji	120,619	107	2,325.41
28	Teluknaga	163,248	106	4,022.87
29	Kosambi	115,208	106	3,871.24
Jumlah/Total		3.293.533	105	3,432.16

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, tahun 2022

Sex Ratio penduduk Kabupaten Tangerang adalah 105 yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, atau setiap 100 perempuan terdapat 105 laki-laki. *Sex Ratio* terbesar terdapat di Kecamatan Cisoka yakni sebesar 111 dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Kelapa Dua dan Kecamatan Kronjo yakni sebesar 100.

Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk terbanyak pada kisaran umur 25-29 tahun yaitu sebesar 301,789 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 152,564 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 149,225 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berdasarkan kelompok umur terdapat pada kisaran umur 75 tahun keatas yaitu sebanyak 25,457 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 11,526 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 13,931 jiwa. Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 3.2

Gambar 3.2
Piramida Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021 (dalam jiwa)



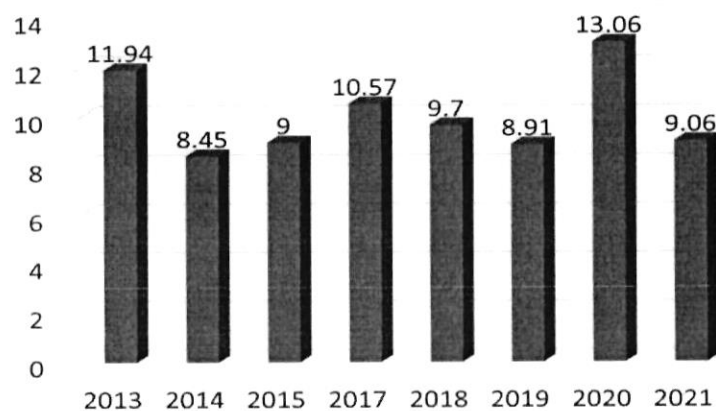
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang tahun 2022

Piramida penduduk Kabupaten Tangerang menurut data tahun 2021 berbentuk piramida ekspansif. Piramida ekspansif memiliki bentuk yang besar pada bagian bawah dan semakin kecil ke bagian puncak. Piramida ini dikenal juga dengan istilah piramida segitiga, kerucut, limas, atau piramida penduduk muda. Kondisi ini menunjukkan penduduk di Kabupaten Tangerang berada dalam keadaan tumbuh. Piramida seperti ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih besar daripada kelompok usia lain. Berarti, angka kelahiran tinggi, dan tingkat kematian bayi rendah. Selain itu, kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk di usia produktif, yaitu golongan usia remaja hingga dewasa mendominasi komposisi penduduk di Kabupaten Tangerang. Komposisi seperti ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai kelebihan, kondisi ini dapat menjadi keuntungan bagi Kabupaten Tangerang karena memiliki SDM usia produktif yang melimpah sebagai bonus demografi.

3.1.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran, angka TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka bersumber dari Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2021, merupakan gambaran kondisi ketenagakerjaan periode Agustus 2021.

Gambar 3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2021



Sumber : BPS Provinsi Banten 2013-2020, diolah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 9,06%. Jumlah penduduk usia kerja (> 15 tahun) di Kabupaten Tangerang sekitar 2,880,692 jiwa, yang terdiri dari angkatan kerja sebesar 1,842,009 jiwa, dan Jumlah bukan Angkatan Kerja sebanyak 1,038,683 jiwa, meliputi Ibu Rumah Tangga, usia Sekolah, dan lainnya.

Jumlah pengangguran tahun 2021 mencapai 166.798 jiwa atau 9,06 persen, dengan penduduk yang bekerja mencapai 1.675.211 jiwa atau sekitar 90.94 persen. Penurunan angka pengangguran ini merupakan imbas dari pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19 yang melanda di seluruh dunia.

3.1.1.3 Pertumbuhan PDRB

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Penyajian PDRB ADHK mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan.

Perekonomian Kabupaten Tangerang tahun 2021 mengalami kenaikan setelah pandemic Covid-19 yang tadinya mengalami kontraksi di tahun 2020 sekitar 3,75%, tumbuh positif ditahun 2021 menjadi 4,63%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2021 dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,96%, dan lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,70%. Dari 17 sektor lapangan usaha yang ada sebanyak 5 sektor lapangan mengalami penurunan yaitu sector lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sector Pertambangan dan Pengalihan, sector Jasa Perusahaan, sector Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, dan sector Jasa Pendidikan. Sebanyak 12 sektor lapangan usaha menunjukkan pertumbuhan yang positif di tahun 2021 yaitu sector lapangan usaha Industri Pengolahan, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas, sector Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, sector Konstruksi, sector Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sector Transportasi dan Pergudangan, sector Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum, sector Informasi dan Komunikasi, sector Jasa Keuangan dan Asuransi, sector Real Estat, sector Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan sector lapangan usaha Jasa Lainnya.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Kategori Lapangan Usaha (persen), Tahun 2018-2021

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,98	2,25	2,82	(0,84)
B	Pertambangan dan Penggalian	5,72	2,30	(5,90)	(9,45)
C	Industri Pengolahan	2,66	3,20	(8,74)	4,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,82	(4,23)	(12,35)	11,70
Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,19	6,71	8,60	5,62
F	Konstruksi	8,18	9,44	(3,29)	11,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,69	6,22	(3,70)	1,83
H	Transportasi dan Pergudangan	9,60	9,55	(5,32)	9,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,62	7,86	(5,63)	4,25
J	Informasi dan Komunikasi	8,35	9,69	9,12	5,17
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,16	0,72	1,58	6,07
L	Real Estat	9,44	9,49	1,96	3,07
M,N	Jasa Perusahaan	6,02	9,20	(6,00)	(2,25)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,48	8,75	(0,38)	(0,81)
P	Jasa Pendidikan	8,25	8,30	0,69	(1,04)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,68	11,13	4,41	9,14
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,69	9,36	(6,11)	1,39
Produk Domestik Regional Bruto		5,80	5,56	(3,75)	4,63

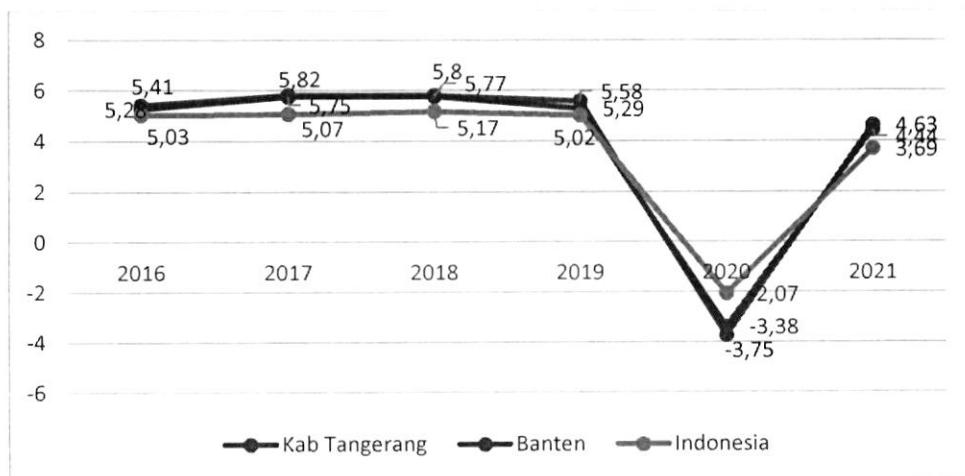
*Angka Sementara. **Angka Sangat Sementara

Sumber : Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2021

Di tahun 2021, PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku (nominal) sebesar 145,210.12 miliar rupiah atau meningkat sebesar 6,98 persen dari tahun sebelumnya yang nilainya 135,737.06 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun yang sama, PDRB atas dasar harga

konstan (PDB riil) adalah sebesar 97,809.90 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 4,63 persen dari tahun sebelumnya yang nilainya 93,482.49 miliar rupiah. Kondisi tersebut mulai menunjukkan peningkatan setelah tahun 2020 yang menyebabkan PDRB Kabupaten Tangerang baik ADHB maupun ADK terganggu. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang menurut PDRB harga konstan relatif sedikit berfluktuasi sejak tahun 2016. Pada tahun 2016 sebesar 5,41%, tahun 2017 meningkat menjadi 5,82% yang merupakan titik tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi turun tipis menjadi 5,80% dan kembali menurun di tahun 2019 mencapai 5,58%. Memasuki tahun 2020 gejolak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun drastis ke angka -3,75%. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Banten dan nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang dalam empat tahun terakhir, nilainya berkisar di atas angka 5,00% dan relatif masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan nasional dari tahun 2016-2019. Sayangnya, pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang menurun hingga angka yang lebih rendah daripada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten maupun Nasional. Laju pertumbuhan ekonomi nasional, Banten dan Kabupaten Tangerang mulai pulih dengan ditunjukkan dengan mulai tumbuh positif, pada tahun 2021 Laju Pertumbuhan Ekonomi meningkat di angka 4,63%, begitu juga dengan Provinsi Banten yang mulai tumbuh sekitar 4,44%.

Gambar 3.4
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2016-2021



Sumber : BPS Nasional, Provinsi Banten, dan Kabupaten Tangerang, 2021

Apabila dilihat berdasarkan kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, pada tahun 2021, kontribusi terbesar pada tahun 2021 dicapai oleh lapangan usaha industry pengolahan sebesar 34,087.80 miliar rupiah, sector lapangan usaha Konstruksi sebesar 13,984.82 miliar rupiah, sector lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,449.47 miliar rupiah, sector lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,051.09 miliar rupiah, dan sector lapangan Real Estat sebesar 8,838.91 miliar rupiah.

Menurut PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha pada tahun 2021 kontribusi sector lapangan usaha yang paling besar dari sector lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 34,087.80 miliar rupiah, sector lapangan usaha Konstruksi sebesar 13,984.82 miliar rupiah, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,449.47 miliar rupiah, dan sector lapangan usaha Real Estat sebesar 8,838.91 miliar rupiah.

Tabel 3.5
 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tangerang
 (miliar rupiah), 2017-2021

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	5,339.40	5,498.45	5,622.08	5,780.75	5,731.96
B	Pertambangan dan Penggalian	35.87	37.92	38.79	36.50	33.05
C	Industri Pengolahan	33,877.15	34,778.08	35,890.71	32,752.30	34,087.80
D	Pengadaan Listrik dan Gas/	1,408.41	1,490.37	1,427.30	1,251.07	1,397.42
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	70.53	74.19	79.17	85.98	90.81
F	Konstruksi	10,909.63	11,802.04	12,916.15	12,491.21	13,984.82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,113.12	10,991.87	11,675.61	11,244.17	11,449.47
H	Transportasi dan Pergudangan	2,461.27	2,697.43	2,955.03	2,797.73	3,074.81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,302.58	1,414.83	1,525.99	1,440.15	1,501.32
J	Informasi dan Komunikasi	4,436.55	4,807.00	5,272.80	5,753.68	6,051.09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,347.71	4,659.19	4,692.76	4,766.98	5,056.55
L	Real Estat	7,019.03	7,681.62	8,410.61	8,575.46	8,838.91
M N	Jasa Perusahaan	823.60	873.19	953.52	896.31	876.19
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,251.11	1,332.18	1,448.75	1,443.24	1,431.56
P	Jasa Pendidikan	1,982.45	2,146.00	2,324.12	2,340.16	2,315.89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	365.41	400.78	445.38	465.03	507.52
R S T U	Jasa Lainnya	1,220.22	1,326.26	1,450.39	1,361.78	1,380.73
	Produk Domestik Regional Bruto	86,964.03	92,011.41	97,129.17	93,482.49	97,809.90

*Angka Sementara. **) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, Tahun 2021

Tabel 3.6
PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2021
(miliar Rupiah)

Lapangan Usaha/Industry		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,151.59	8,678.39	9,045.55	9,434.71	9,478.49
B	Pertambangan dan Penggalian	51.56	56.53	58.54	55.54	50.93
C	Industri Pengolahan	43,841.07	46,552.10	49,164.34	45,198.21	48,029.60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,769.27	4,947.79	4,693.53	4,096.17	4,630.78
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	74.50	79.67	85.48	93.49	100.07
F	Konstruksi	16,202.51	18,448.09	20,797.30	20,163.35	23,462.79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,138.61	14,742.54	16,234.31	15,934.12	16,403.08
H	Transportasi dan Pergudangan	3,449.70	3,865.87	4,320.45	4,145.89	4,651.08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,786.71	1,960.20	2,133.60	2,023.94	2,122.18
J	Informasi dan Komunikasi	3,907.54	4 136.44	4,505.50	4,898.70	5,144.91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,344.54	7,081.15	7,290.26	7,413.70	8,241.82
L	Real Estat	8,688.00	9,698.31	10,957.41	11,392.27	11,860.24
M,N	Jasa Perusahaan	1,240.18	1,357.31	1,537.09	1,470.01	1,454.87
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,027.46	2,200.72	2,469.16	2,571.45	2,616.72
P	Jasa Pendidikan	3,011.68	3,444.99	3,899.57	3,983.80	3,963.05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	496.31	570.59	656.87	695.57	774.43
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,812.85	2,005.27	2,240.33	2,166.13	2,225.07
	Produk Domestik Regional Bruto	118,994.08	129,825.98	140,089.29	135,737.06	145,210.12

*Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang 2021

Tabel 3.7
Kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2018-2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,85	6,68	6,46	6,95	6,53
B	Pertambangan dan Penggalian	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
C	Industri Pengolahan	36,84	35,86	35,10	33,30	33,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,01	3,81	3,35	3,02	3,19
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
F	Konstruksi	13,62	14,21	14,85	14,85	16,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,04	11,36	11,59	11,74	11,30
H	Transportasi dan Pergudangan	2,90	2,98	3,08	3,05	3,20
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,50	1,51	1,52	1,49	1,46
J	Informasi dan Komunikasi	3,28	3,19	3,22	3,61	3,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,33	5,45	5,20	5,46	5,68
L	Real Estat	7,30	7,47	7,82	8,39	8,17
M,N	Jasa Perusahaan	1,04	1,05	1,10	1,08	1,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,70	1,70	1,76	1,89	1,80
P	Jasa Pendidikan	2,53	2,65	2,78	2,93	2,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,42	0,44	0,47	0,51	0,53
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,52	1,54	1,60	1,60	1,53
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan / Note: * Angka sementara / Preliminary figures

** Angka sangat sementara / Very preliminary figures

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, 2021

3.1.1.4 Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Berdasarkan pemantauan Badan Pusat Statistik terhadap 416 jenis barang dan jasa serta hasil Survei Biaya Hidup (SBH) di Kota Serang, Tangerang dan Cilegon baik secara mingguan, dua mingguan maupun bulanan, diketahui pada bulan Desember 2021 ini sebanyak 215 komoditas mengalami perubahan harga. Rincian lengkapnya adalah 158 komoditas mengalami kenaikan harga dan sisanya sebanyak 57 komoditas mengalami penurunan harga, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga dibulan Desember 2021 antara lain:

cabai rawit, cabai merah, telur ayam ras, minyak goreng, cabai hijau, kacang panjang, daun bawang, ketimun, tarif dokter. Gigi, dan cumi-cumi. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga selama bulan Desember 2021, antara lain: biaya administrasi transfer uang, kulit melinjo, tomat, pelicin/pewangi pakaian, pir, pil KB, kol putih/kubis, rampela hati ayam, obat batuk, dan kepiting/rajungan. Angka inflasi disajikan dalam tabel 1.10.

Pada Desember 2021 dari 11 kelompok pengeluaran, 7 kelompok memberikan andil/ sumbangan inflasi, 4 kelompok pengeluaran lainnya memberikan andil/sumbangan inflasi kurang dari 0,01 persen. Kelompok yang menyumbangkan andil inflasi yaitu kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 0,55 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,05 persen; kelompok Transportasi sebesar 0,03 persen; kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,02 persen; kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,02 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Lainnya sebesar 0,01 persen; dan kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,01 persen. Sedangkan kelompok Pakaian dan Alas Kaki; kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya; dan kelompok Pendidikan masing-masing menyumbang inflasi sebesar kurang dari 0,01 persen. Beberapa komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada bulan Desember ini adalah komoditas: minyak goreng, telur ayam ras, cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, tarif dokter spesialis, angkutan udara, buah naga, sabun detergen bubuk/cair, dan tarif check up. Sementara komoditas yang dominan menyumbang deflasi pada bulan Desember ini adalah komoditas: pengharum cucian/pelembut pakaian, tomat, susu bubuk untuk balita, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, pepaya, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, susu bubuk, popok bayi sekali pakai/diapers, dan susu cair kemasan.

Kabupaten Tangerang mengalami inflasi sebesar 0,69 persen. Komoditas yang memberikan andil inflasi di Kabupaten Tangerang adalah minyak goreng sebesar 0,12 persen, telur ayam ras sebesar 0,10 persen, cabai merah sebesar 0,07 persen, daging ayam ras dan cabai rawit masing-masing sebesar 0,06 persen. Sementara komoditas yang memberikan andil deflasi, yaitu pengharum cucian/pelembut sebesar 0,02 persen, ikan tongkol, bawang merah, - 29 -apaya dan susu bubuk untuk balita masing-masing sebesar 0,01 persen.

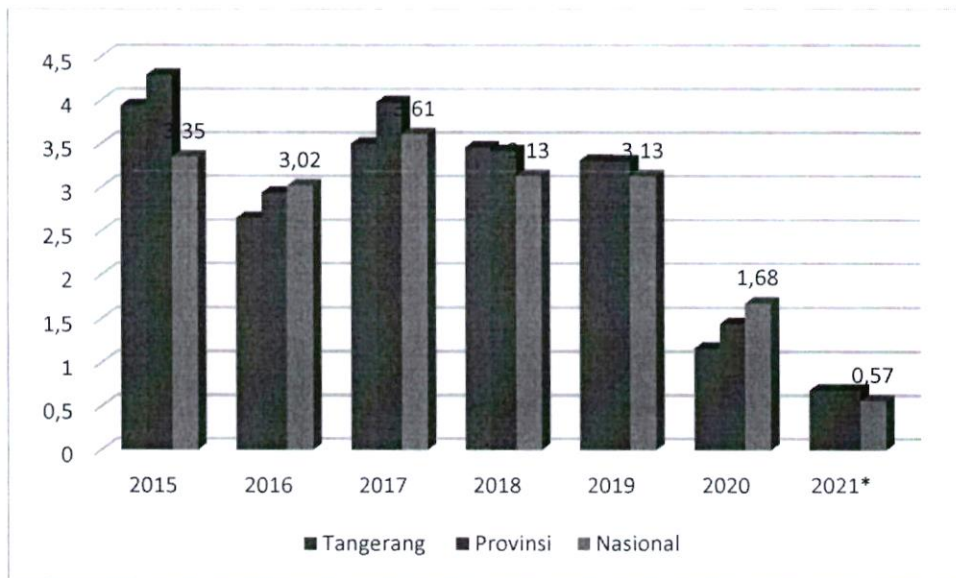
Tabel 3.8
Perkembangan Inflasi di Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2015-2020

inflasi YoY (%)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Kota Tangerang	3,94	2,65	3,50	3,46	3,31	1,17	0,69
Kota Serang	4,28	3,26	5,17	3,78	3,06	1,89	0,73
Kota Cilegon	4,67	4,22	5,24	2,73	3,54	2,59	0,66
Provinsi Banten	4,29	2,94	3,98	3,42	3,30	1,45	0,69
Nasional	3,35	3,02	3,61	3,13	3,13	1,68	0,57

* Desember 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 3.5
Perkembangan Inflasi di Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2015-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Perkembangan tingkat inflasi Tangerang, Kota Serang, dan Kota Cilegon dari tahun 2015-2021 relatif berfluktuasi. Inflasi Kabupaten Tangerang sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Tangerang, hal tersebut karena Kabupaten Tangerang belum dipilih oleh BPS RI sebagai acuan penghitungan inflasi pada kota-kota di Indonesia. Pada periode tahun 2015-2021, laju inflasi di Kota Tangerang memiliki tren yang cenderung menurun. Nilai inflasi tertinggi Kota Tangerang adalah pada tahun 2015, yaitu sebesar 3,94%, sementara nilai inflasi pada tahun 2021 adalah yang terendah, yaitu sebesar 0,69%.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan dengan nilai inflasi Provinsi Banten, nilai inflasi di Kota Tangerang pada tahun 2019 adalah sebesar 3,31% sama jika dibandingkan Provinsi Banten yang juga sebesar 3,30%, memasuki tahun 2020 inflasi kota Tangerang menurun mencapai nilai 1,17% yang nilainya sedikit lebih rendah dari inflasi Provinsi Banten sebesar 1,45%. Sementara itu,

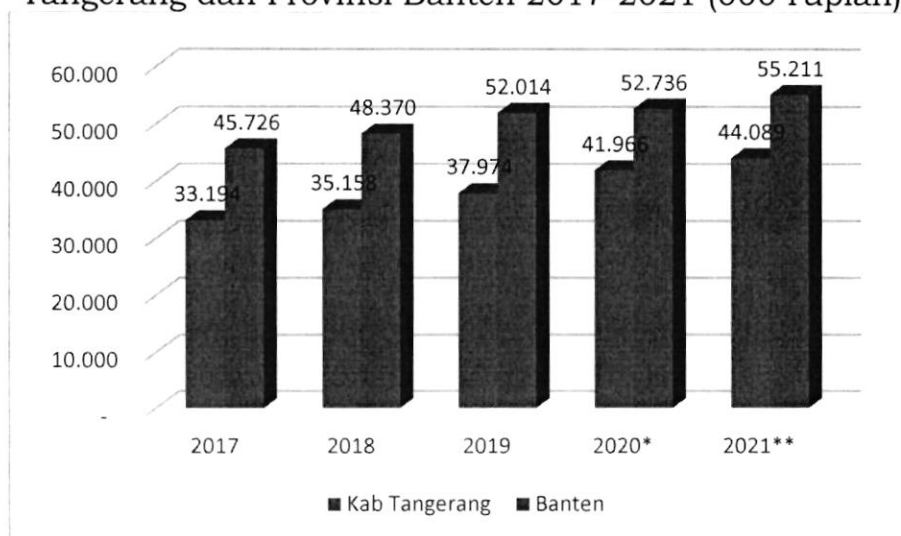
jika dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional pada tahun 2019-2021, inflasi Kota Tangerang pada tahun 2019 mencatat nilai yang lebih tinggi yaitu 3,30% dibandingkan inflasi Nasional sebesar 2,72% dan tahun 2020 inflasi Kota Tangerang sebesar 0,17% tercatat lebih rendah daripada inflasi nasional tahun 2020 sebesar 1,68%, dan pada Desember 2021 inflasi pada angka 0,57%.

3.1.1.5 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan setiap penduduk rata-rata, sehingga bisa dijadikan salah satu indikator bagi keberhasilan pembangunan terutama pembangunan terutama pembangunan bidang ekonomi. Meskipun demikian PDRB per kapita belum dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Indikator tersebut hanya dapat dipakai untuk menggambarkan apakah ada peningkatan produktivitas pembangunan setiap orangnya. PDRB per kapita sebagai salah satu indikator produktivitas penduduk dapat dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk.

Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, PDRB per kapita menurut harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021. PDRB per kapita mencapai titik tertinggi di tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 44.089 (000 rupiah). PDRB per kapita Kabupaten Tangerang menurut Harga Konstan tahun 2021 sebesar Rp. 29.698 (000 rupiah).

Gambar 3.6
Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2017-2021 (000 rupiah)

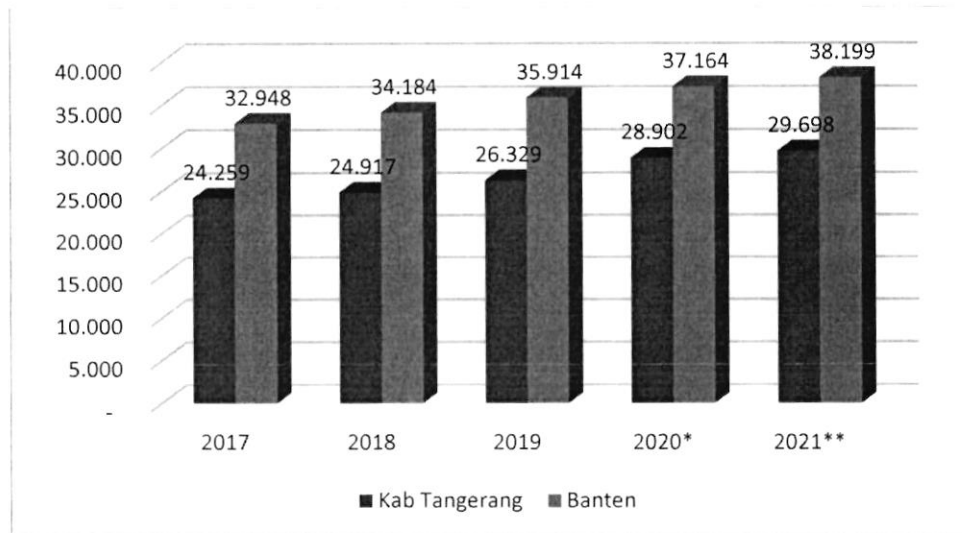


Sumber: BPS Provinsi Banten, 2022

* Angka Sementara

** Angka sangat sementara

Gambar 3.7
Perkembangan PDRB Per Kapita Menurut Harga Konstan di Kabupaten
Tangerang dan Provinsi Banten 2017-2021 (000 rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2022

* Angka Sementara

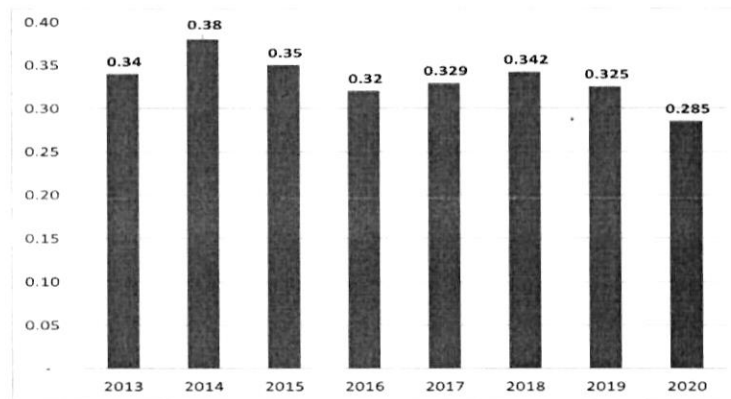
** Angka sangat sementara

3.1.1.6 Indeks Gini

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Adanya penurunan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat yang diukur oleh Gini Ratio. Gini Ratio dibagi atas tiga level. Level pertama, menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah, yaitu berada pada kisaran 0 sampai 0,3. Level kedua, ketimpangan menengah, yaitu antara 0,3 hingga 0,5. Level ketiga, ketimpangan tinggi, yaitu berada di atas 0,5.

Gini Rasio Kabupaten Tangerang tahun 2020 sebesar 0,285 angka ini menurun sebesar 0,040 poin dibandingkan dengan Gini Ratio 2019 yang sebesar 0,325. Ini menandakan ketimpangan orang kaya dan miskin di Indonesia semakin rendah, Ini dimungkinkan karena terjadinya penurunan pengeluaran atau daya beli pada kelompok penduduk, terutama yang menengah ke atas

Gambar 3.8
Gini Rasio Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020



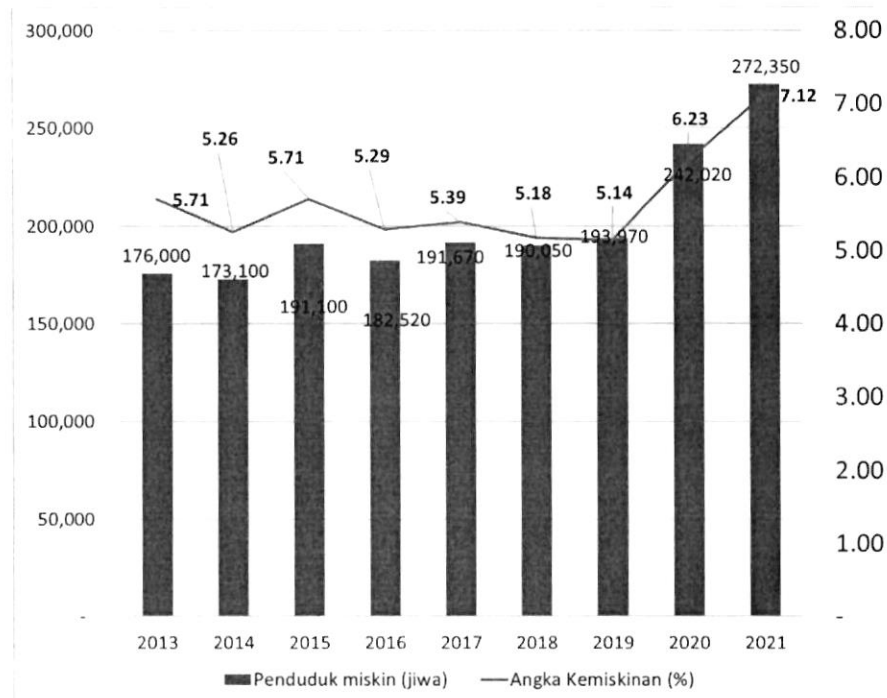
Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020

3.1.1. 7. Penduduk Miskin

Kemiskinan didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemiskinan absolut yang mana pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada satu garis yang disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan ini terdiri dari 2 komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan jumlah penduduk miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.9 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021

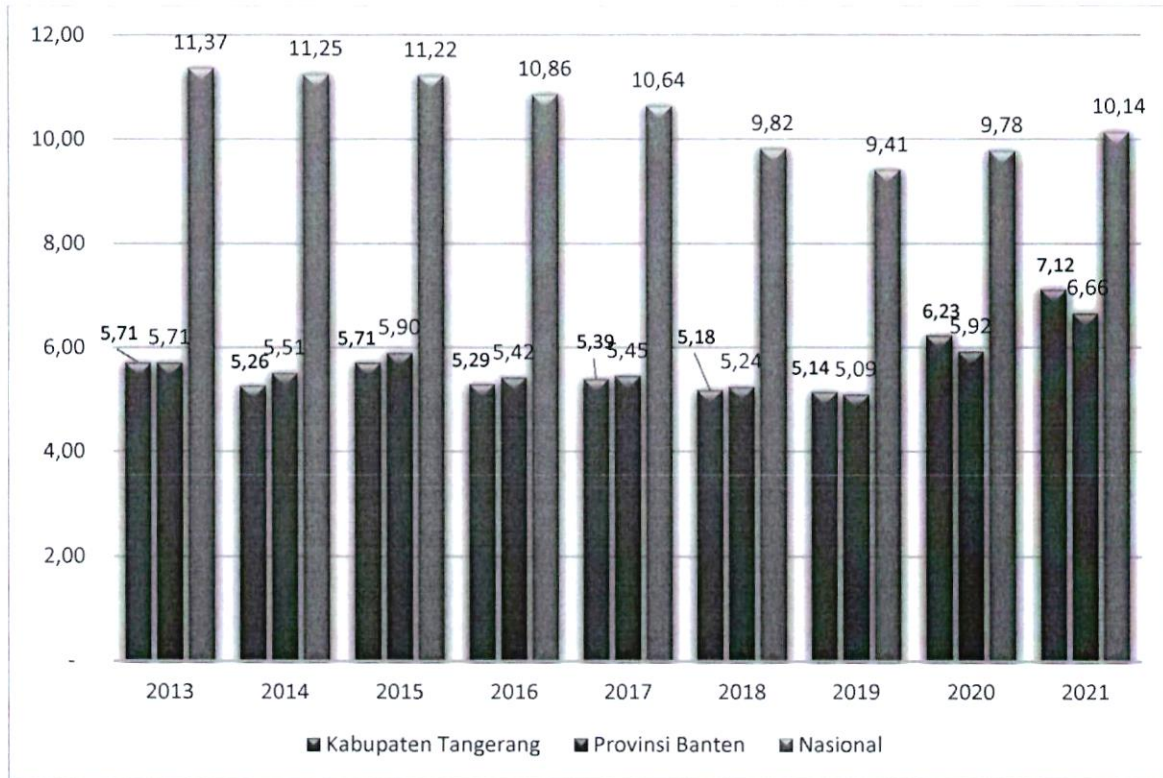


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan data yang telah dirilis oleh BPS, indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Tangerang tahun 2020 sekitar 0,95 dan tahun 2021 meningkat hingga 1,21. Sedangkan pada tahun 2020 indeks keparahan kemiskinan (P2) mencapai 0,22 dan tahun 2021 mencapai 0,29. Sementara itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tahun 2020 sekitar 6,23% atau sebanyak 242.160 orang, tahun 2021 naik menjadi 272,350 orang atau sekitar 7,12 persen. Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2021 senilai Rp 545.065,-/kapita/bulan.

Selain itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang berfluktuasi nilainya, pada tahun 2018 mengalami penurunan mencapai nilai sebesar 5,18% kemudian persentase penduduk miskin tahun 2019 kembali menurun hingga mencapai 5,14%, tetapi kembali meningkat di tahun 2020-2021 hingga mencapai 6,23 - 7,12%. Sementara itu, Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional pada Tahun 2013-2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 3.10 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2013-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

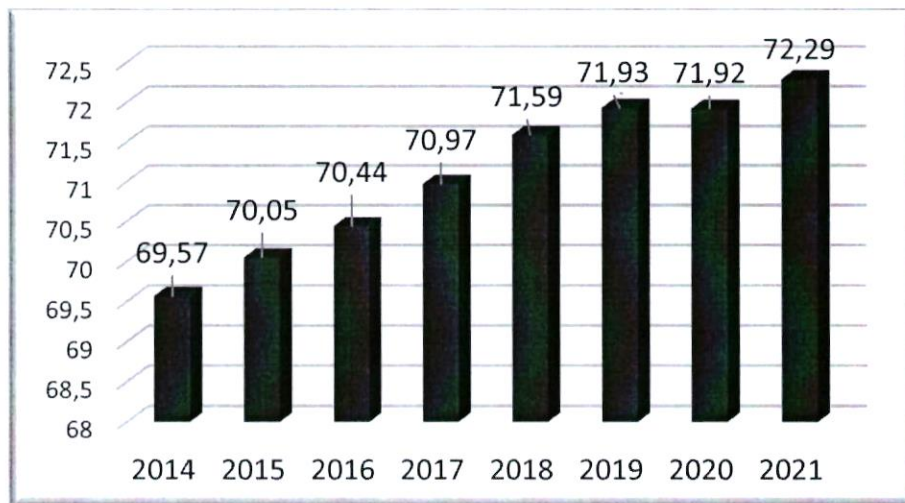
Upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengentaskan kemiskinan dengan menjalankan beberapa program yang berasal dari pemerintah pusat, antara lain seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan non tunai. Selain itu, juga pembentukan tim reaksi cepat (TRC) untuk menanggulangi angka kemiskinan dengan memberikan pendampingan usaha bagi warga miskin. Sedangkan jika dilihat pada tiga tahun ke belakang, pada tahun 2017, 2018, dan 2019 persentase penduduk miskin di tingkat Provinsi Banten dan Nasional trennya juga cenderung mengalami penurunan.

Kondisi yang berbeda terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Pandemi Covid-19 turut memberikan dampak meningkatnya persentase penduduk miskin baik di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, maupun di tingkat Nasional. Di Kabupaten Tangerang, persentase penduduk miskin meningkat menjadi 7,12%, sedangkan di level Provinsi Banten, persentase penduduk miskin juga meningkat menjadi 6,66%. Di level nasional, persentase penduduk miskin meningkat hingga menjadi 10,14%.

3.1.1.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian angka IPM Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan ditahun 2021 sebesar 72.29, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersumber dari indeks komposit IPM yang dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak .

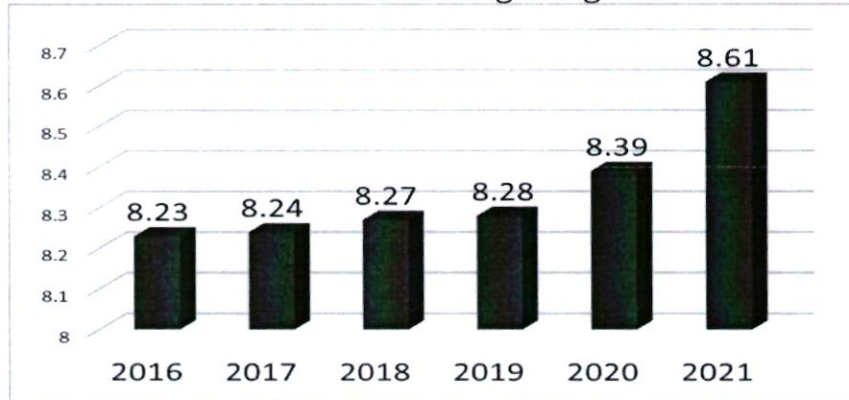
Gambar 3.11
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2021



Sumber : BPS Provinsi Banten, 2021

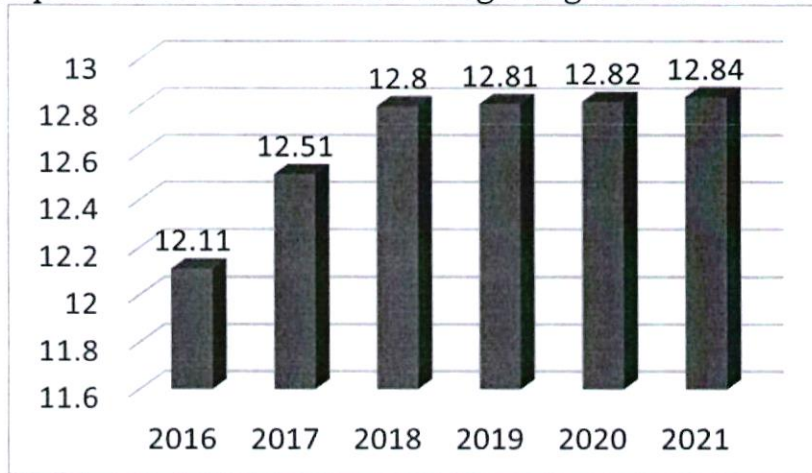
Pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, Standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity), dan Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tangerang tahun 2021 sebesar 8.61, dengan harapan lama sekolah (HLS) tahun 2021 selama 12,84 tahun, dengan angka harapan hidup (AHH) selama 69,93 tahun.

Gambar 3.12
Rata-rata Lama Sekolah Kab Tangerang Tahun 2016-2021



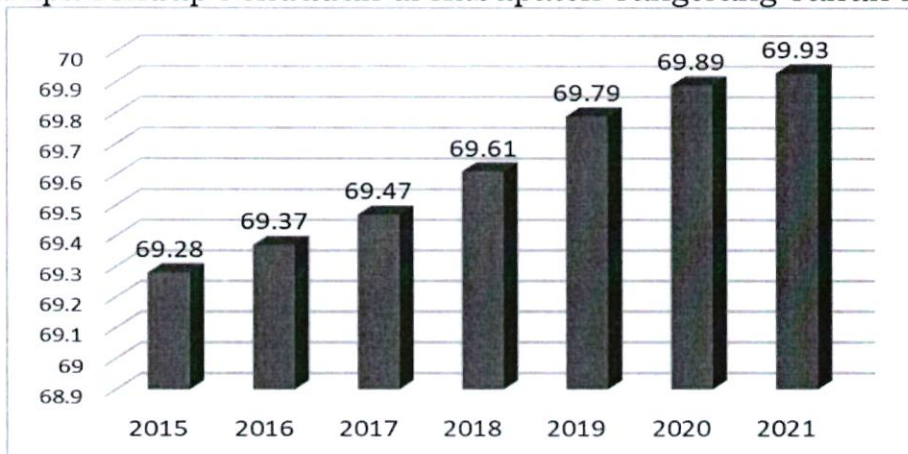
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2021

Gambar 3.13
Harapan Lama Sekolah Kab Tangerang Tahun 2016-2021



Sumber : BPS Provinsi Banten, 2021

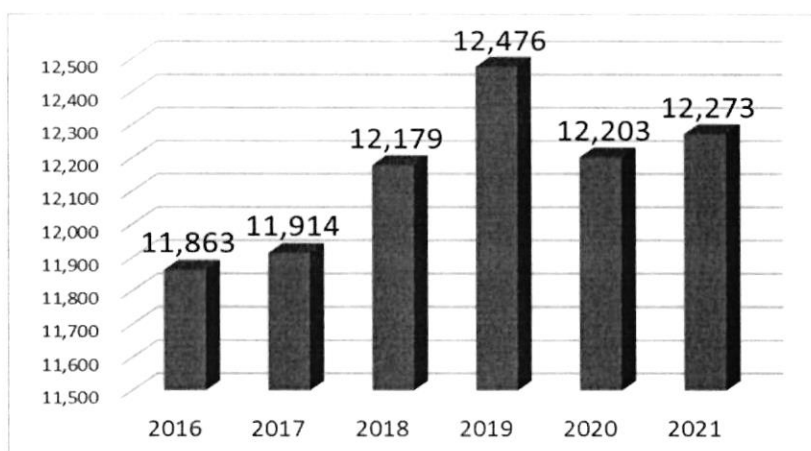
Gambar 3.14
Angka Harapan Hidup Penduduk di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2021



Sumber : BPS Provinsi Banten, 2021

Gambar 3.15

Angka Harapan Hidup Penduduk di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2021



Sumber : BPS Provinsi Banten, 2021

Indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak, kontribusi daya beli yang naik dari tahun 2020, ditahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp. 12.273.000 Perkapita/tahun. Pertumbuhan daya beli yang naik itu terkait dengan pemulihan ekonomi daerah yang mulai pulih daya beli masyarakatnya.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022, pada perubahan ini menargetkan capaian indikator makro daerah sebagai berikut :

- Laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,21 persen.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,8 persen,
- Angka kemiskinan diproyeksikan turun sekitar 7 persen
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan sekitar 72,82

Untuk lebih jelasnya, Capaian dan Target dapat dilihat tabel 3.9

Tabel 3.9

Target Makro Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	Data Awal	Capaian			Target	
	Indikator Makro		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	LPE	Persen	5,93	5,45	-3,7	4,63	5,21	5,47
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	9,7	8,91	13,06	9,06	8,8	8,3
3	Kemiskinan	Persen	5,18	5,14	6,23	7,12	7	6,5
4	IPM	Nilai	71,59	71,93	71,92	72,29	72,82	73,26

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2022
Perubahan RPJMD Kab Tangerang Tahun 2019-2023

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada ketentuan perundangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. Adapun Arah Kebijakan Keuangan Daerah memuat realisasi dan proyeksi/target serta arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

3.2.1 Kondisi, Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah, otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah, sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki.

Pertumbuhan pendapatan daerah baik Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dari Transfer Pusat dan Propinsi serta dari Pendapatan Asli Daerah

Lainnya sangat dipengaruhi oleh keadaan pandemi Covid-19, baik dalam hal pembatasan kegiatan sosial masyarakat, pembatasan penggunaan anggaran kegiatan, pembatasan pelayanan publik, pemberian insentif atau pengurangan pajak, denda dan bunga pajak maupun penurunan aktifitas ekonomi masyarakat.

Upaya diatas dijabarkan lebih teknis melalui upaya intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan daerah. Adapun aktivitas yang berkaitan langsung dengan upaya tersebut antara lain :

a. Intensifikasi

Intensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan tercapainya optimalisasi pajak penerimaan daerah dari wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak melalui upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak tersebut untuk melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Sosialisasi kepada wajib pajak daerah terkait ketentuan perpajakan daerah.
2. Monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
3. Pengawasan kepatuhan dan kebenaran kewajiban pembayaran pajak para wajib pajak.
4. Optimalisasi pajak melalui pemeriksaan pajak.
5. Dukungan pemanfaatan dan pengembangan aplikasi teknologi sistem informasi manajemen terkini guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan perluasan cakupan subjek pajak dan objek pajak. Upaya ini dilakukan dengan cara :

1. Pendataan dan survey subjek pajak dan objek pajak guna mengetahui informasi berkaitan dengan objek pajak dan subjek pajak yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Tujuan akhir dari kegiatan ini diharapkan wajib pajak secara sukarela mendaftarkan diri atau berdasarkan data yang dimiliki fokus melakukan pengukuhan secara jabatan dan mengenakan pajak atas subjek pajak atau objek pajak yang semula belum dikenakan pajak.
2. Koordinasi optimalisasi pajak daerah melalui kerjasama dengan instansi terkait untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Arah kebijakan anggaran pendapatan untuk setiap kelompok pendapatan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah, arah kebijakan mencakup :
 - a. Perencanaan target PAD mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu serta potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah;
 - b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan;
 - c. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
 - d. Peningkatan sosialisasi kepada subyek dan obyek pajak maupun retribusi serta melakukan pendekatan persuasif, agar mereka mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Pembinaan yang intensif kepada petugas dan unit penghasil, agar dalam pelayanannya dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan tidak berbelit-belit bagi seluruh subyek pajak dan atau retribusi daerah;
 - f. Kerjasama dengan lembaga/institusi lainnya yang akan membantu dan mendukung kelancaran pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
 - g. Mengintensifkan obyek pungutan yang telah ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Mengkaji ulang sejumlah peraturan yang berkenaan dengan lain-lain pendapatan yang sah, agar dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sejalan dengan kemampuan ekonomi masyarakat.
- 2) Untuk kelompok pendapatan transfer, arah kebijakannya mencakup:
 - a. Peningkatan koordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk setiap obyek dari pendapatan transfer sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengadakan komunikasi yang intensif kepada lembaga ditingkat pusat dan provinsi khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana transfer bagi kabupaten/kota;

- c. Merencanakan dan mendukung berbagai program yang telah ditetapkan oleh Provinsi Banten dan pemerintah pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Tangerang sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10

Proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2022

NO	URAIAN	2022	PERUBAHAN 2022	SELISIH	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.583.428.104.592	2.715.364.598.612	131.936.494.020	5,11
4.1.01	Pajak Daerah	1.961.053.392.906	2.061.500.000.000	100.446.607.094	5,12
4.1.02	Retribusi Daerah	79.785.396.662	75.875.661.976	(3.909.734.686)	-4,90
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	53.789.023.713	55.061.989.407	1.272.965.694	2,37
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	488.800.291.311	522.926.947.229	34.126.655.918	6,98
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	3.154.266.365.989	3.164.266.365.989	10.000.000.000	0,32
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.449.768.183.000	2.449.768.183.000	-	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	704.498.182.989	714.498.182.989	10.000.000.000	1,42
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	0,00
	Jumlah Pendapatan	5.737.694.470.581	5.879.630.964.601	141.936.494.020	2,47

Sumber : Bapenda Kabupaten Tangerang, 2022

3.2.2. ARAH KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, dalam bentuk Program/Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Nomenklatur Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang hingga saat ini telah divalidasi melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

1. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai;

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi tersebut diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Tangerang memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

b. Belanja barang dan jasa;

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Belanja modal meliputi:

- a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- f. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah

Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

- a. Belanja Bagi Hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu minimal 10 persen dari Pendapatan Pajak dan Retribusi
- b. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Tangerang terdiri dari bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan Transfer Dana Desa

Tabel 3.
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2022

NO	URAIAN	2022	PERUBAHAN 2022	SELISIH	%
5	BELANJA				
5,1	BELANJA OPERASI	4.163.674.254.397	4.770.677.477.583	607.003.223.186	14,58
5.1.01	Belanja Pegawai	2.163.930.782.176	2.411.247.262.094	247.316.479.918	11,43
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.713.306.992.921	2.057.993.736.189	344.686.743.268	20,12
5.1.05	Belanja Hibah	280.388.479.300	295.388.479.300	15.000.000.000	5,35
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.048.000.000	6.048.000.000	-	0,00
5,2	BELANJA MODAL	1.165.681.312.343	1.222.540.589.438	56.859.277.095	4,88
5.2.01	Belanja Modal Tanah	134.294.460.679	156.218.737.774	21.924.277.095	16,33
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.496.102.737	178.496.102.737	10.000.000.000	5,93
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	392.255.955.567	367.190.955.567	(25.065.000.000)	-6,39
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	445.267.859.292	495.267.859.292	50.000.000.000	11,23
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.366.934.068	25.366.934.068	-	0,00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000	50.000.000.000	-	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	50.000.000.000	-	0,00
5,4	BELANJA TRANSFER	631.138.903.841	660.141.921.498	29.003.017.657	4,60
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	184.734.548.541	213.737.566.198	29.003.017.657	15,70
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	446.404.355.300	446.404.355.300	-	0,00
	Jumlah Belanja	6.010.494.470.581	6.703.359.988.519	692.865.517.938	11,53
	Total Surplus/(Defisit)	(272.800.000.000)	(823.729.023.918)	(550.929.023.918)	201,95

Sumber : Bappeda Kabupaten Tangerang, 2021

Pengelompokan jenis belanja hanya merupakan pendekatan karena penyusunan RKPD 2022 tidak menggunakan Rincian Belanja, sehingga akan terdapat perbedaan struktur belanja bila OPD telah melakukan input rincian dalam dokumen RKA.

3.2.3. ARAH KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan terdiri atas penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan daerah Kabupaten Tangerang bersumber dari SiLPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel.3.11
Proyeksi Anggaran Perubahan Pembiayaan Tahun 2022

NO	URAIAN	2022	PERUBAHAN 2022	SELISIH	%
6	PEMBIAYAAN				
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	300.000.000.000	850.929.023.918	550.929.023.918	183,64
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	300.000.000.000	850.929.023.918	550.929.023.918	183,64
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	300.000.000.000	850.929.023.918	550.929.023.918	183,64
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.200.000.000	27.200.000.000	-	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	27.200.000.000	27.200.000.000	-	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	27.200.000.000	27.200.000.000	-	0,00
	Pembiayaan Netto	272.800.000.000	823.729.023.918	550.929.023.918	201,95

Sumber : Bappeda Kabupaten Tangerang, 2021

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, Pemerintah Daerah telah melakukan kajian terhadap berbagai aspek seperti kajian terhadap program prioritas Pemerintah yang dituangkan dalam RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Banten dan isu-isu strategis yang ada di daerah yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RKPD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJMD periode berkenaan. Sasaran RKPD juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan pada tahun berkenaan. Sementara sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Berdasarkan pernyataan tujuan dan indikator tujuan yang telah ditetapkan, maka dilakukan cascading down yaitu menurunkan rencana pencapaian indikator tujuan kepada indikator sasaran yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator tujuan yang hendak dicapai target kinerjanya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel.

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No.	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD
1	2	3	4
1	Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.	Meningkatkan perilaku spritualitas masyarakat	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
2	Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	
			Meningkatnya Derajat Kesehatan
			Meningkatnya Pengarusutamaan Gender
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan
3	Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan	Meningkatkan Daya Saing Daerah	
			Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dan sektor pariwisata
			Meningkatnya jumlah investasi
			Meningkatnya kualitas SDM yang memiliki kompetensi/skill
			Meningkatnya produk hasil UMKM dan IKM
4	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	
			Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah
			Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik
			Meningkatnya Integritas Aparatur

No.	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD
1	2	3	4
			Meningkatnya cakupan dan pelaksanaan e- government
5	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah	Meningkatkan pemerataan pembangunan Wilayah	
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
		Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
			Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tangerang
6	Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.	Meningkatkan Produk Inovasi Daerah yang dapat mendukung kinerja dan ekonomi pemerintah daerah	
			Meningkatnya Kinerja Inovasi Daerah

Tabel 4.2
Hubungan Misi, Tujuan dan Strategi Pembangunan

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius	Meningkatkan perilaku spritualitas masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama	1. Meningkatkan kepatuhan <i>stakeholders</i> terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
			2. Meningkatkan pendidikan karakter dan spiritualitas peserta didik
			3. Meningkatkan kapasitas lembaga dan tokoh agama
			4. Meningkatkan kesejahteraan guru ngaji dan petugas pemulasaran jenazah
2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan	1. Meningkatkan upaya preventif dan promotif melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
			2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sarana / fasilitas kesehatan yang berkualitas
			3. Meningkatkan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya pengarusutamaan gender	1. Meningkatkan kualitas pembangunan yang responsif gender
			2. Menyusun kebijakan berbasis gender dan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan - Hasil Revisi	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan
			2. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik
			3. Meningkatkan minat baca masyarakat
			4. Meningkatkan kapasitas lembaga dan tokoh budaya
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan sektor pariwisata	1. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan sektor pariwisata
		Meningkatnya jumlah investasi	1. Meningkatkan daya saing dan mempermudah investasi daerah
		Meningkatnya kualitas SDM yang memiliki kompetensi/ <i>skill</i>	1. Meningkatkan pelatihan ketenagakerjaan
		Meningkatnya produk hasil UMKM dan IKM	1. Meningkatkan produktivitas UMKM dan IKM
			2. Meningkatkan pertumbuhan industri daerah
			3. Meningkatkan pertumbuhan perdagangan daerah
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1. Meningkatkan kinerja perencanaan dalam pembangunan daerah.
			2. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan PAD.
			3. Meningkatkan implementasi sistem penyelenggaraan

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
			pemerintahan yang terbuka dan partisipatif.
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik	1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan di tingkat kecamatan.
			2. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan.
			3. Meningkatkan kinerja kearsipan melalui implementasi teknologi dan digitalisasi.
			4. Meningkatkan kondusivitas regulasi untuk mendukung pembangunan daerah.
			5. Meningkatkan kinerja pelayanan umum penyelenggaraan pemerintahan.
		Meningkatnya Integritas Aparatur	1. Meningkatkan kualitas manajemen ASN dengan fokus pada sistem kepegawaian dan profesionalitas pegawai.
			2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan.
		Meningkatnya cakupan dan pelaksanaan e-government	1. Meningkatkan cakupan pemanfaatan teknologi untuk mengakselerasi kualitas dan kapasitas pelayanan.
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan	Meningkatkan pemerataan pembangunan Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan beserta kelengkapannya

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah			
		2. Menurunkan Luasan Kawasan Kumuh	
		3. Meningkatnya pencegahan dan penanganan bencana	
		4. Menurunkan Ketimpangan Aksesibilitas dan Transportasi wilayah	
		5. Meningkatkan akses infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan	
		6. Meningkatkan ketersediaan transportasi umum	
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Menurunkan tingkat pencemaran Air, Tanah dan Udara
			2. Meningkatkan Luas Ruang Terbuka Privat dan RTH
			3. Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebijakan umum ruang daerah
			4. Meningkatkan Pengendalian SSDEW (Situ, Sungai, Danau, Embung dan Waduk)
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	1. Meningkatkan penanganan dan pengelolaan timbulan sampah
		Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tangerang	2. Meningkatkan layanan pencegahan bencana alam dan non-alam
			3. Meningkatkan layanan

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya	Meningkatkan Produk Inovasi Daerah yang dapat mendukung kinerja dan ekonomi pemerintah daerah	Meningkatkan Kinerja Inovasi Daerah	penyelamatan, dan evakuasi bencana alam dan non-alam
			1. Meningkatkan inovasi pemuda
			2. Meningkatkan inovasi perangkat daerah untuk memperkuat kinerja pemerintahan
			3. Meningkatkan inovasi yang memiliki nilai tambah pada ekonomi daerah.

Tabel 4.3
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2022

No.	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatkan penerapan nilai- nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.	Meningkatkan perilaku spritualitas masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08	
				Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban	101,86%	148,40%	100%	100%	100%	
2	Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		Angka IPM	71,93	71,92	72,29	72,82	73,26	
				Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	69,79	69,89	69,93	70,08	70,21
					Prevalensi stunting	12%	8,50%	7,3%	16%	14%
					Cakupan Jaminan Kesehatan (UHC)	80%	81%	83,21%	83,00%	88%
				Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,54	61,53	71,12	62,05	62,11
				Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Dalam Tahun)	8,28	8,39	8,61	08,45	8,7
3	Mengembangkan ekonomi daerah yang	Meningkatkan Daya Saing Daerah		Tingkat kemiskinan	5,14%	6,23%	7,12%	7%	6,5%	
				Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,45%	-3,70%	4,63%	5,21%	5,47%	

No.	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realiasi 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	kompetitif dan berbasis kerakyatan			Tingkat Pengangguran (TPT)	8,91%	13,06%	9,06%	8,8%	8,3%	
				Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dan sektor pariwisata	Laju Pertumbuhan ekonomi sektor Pertanian (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan)	2,25%	3,69%	-0,84%	5,27%	5,56%
				Meningkatnya kualitas SDM yang memiliki kompetensi/skill	Tingkat Partispasi Angkatan Kerja (TPAK)	-27,8	20,1	63,95	68	5,12
				Meningkatnya kualitas SDM yang memiliki kompetensi/ skill	Tingkat Partispasi Angkatan Kerja	66.07%	65.43%	66%	68%	70%
				Meningkatnya produk hasil UMKM dan IKM	Persentase koperasi aktif	49.92	56.80	39,9	55.0	60
					Jmlah Industri kecil dan Menengah di Kabupaten	16.348	17.000	571	19.000	20.000
4	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	50.37	58.39	66.41	74.43	82,45	
				Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	70,13	70,75	71,37	71,99	72,61
				Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,66	86,36	85,95	83	89

No.	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Meningkatnya Integritas Aparatur	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,39	3,59	3,79	3,99	4,19
			Meningkatnya cakupan dan pelaksanaan e-government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,98	3	2,99	3,25	3,25
5	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah	Meningkatkan pemerataan pembangunan Wilayah		Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	103,78	101,41	100,57	99,74	99,11
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik	87	89	71,4	95	95
				Presentase Sumber Air Minum Rumah Tangga	42,35	41,59	83,13	60	60
				Indeks Sanitasi	65,5	67,5	72,5	82,5	82,5
		Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	47,57	58,68	54,7	57	55,7
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IKA (Indeks Kualitas Air)	67,29	63,49	56,43	57,5	57,5
			Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang ditangani	24,13	24,63	25,2	26,13	26,13
			Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tangerang	Indeks Risiko Bencana	163,32	146,93	146,93	130	125

No.	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/ Sasaran	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realiasi 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.	Meningkatkan Produk Inovasi Daerah yang dapat mendukung kinerja dan ekonomi pemerintah daerah		Predikat Indeks Inovasi Daerah	Kurang Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Terinov atif
			Meningkatnya Kinerja Inovasi Daerah	Persentase inovasi yang diimplementasikan	25%	45%	77,78	68%	81%

4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2022

4.2.1 Keselarasan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang

Tema pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial, dan tema pembangunan Provinsi Banten adalah Pemantapan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia, sedangkan tema pembangunan di Kabupaten Tangerang adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan, dalam tema pembangunan baik Nasional, Provinsi Banten maupun Kabupaten Tangerang terkandung makna bahwa pembangunan diarahkan untuk percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh dengan peningkatan SDM masyarakat, dan SDM aparatur dan semua itu diharapkan dapat memulihkan kondisi kehidupan sosial masyarakat. Adapun gambaran penyelarasan tema pembangunan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar. 4.2

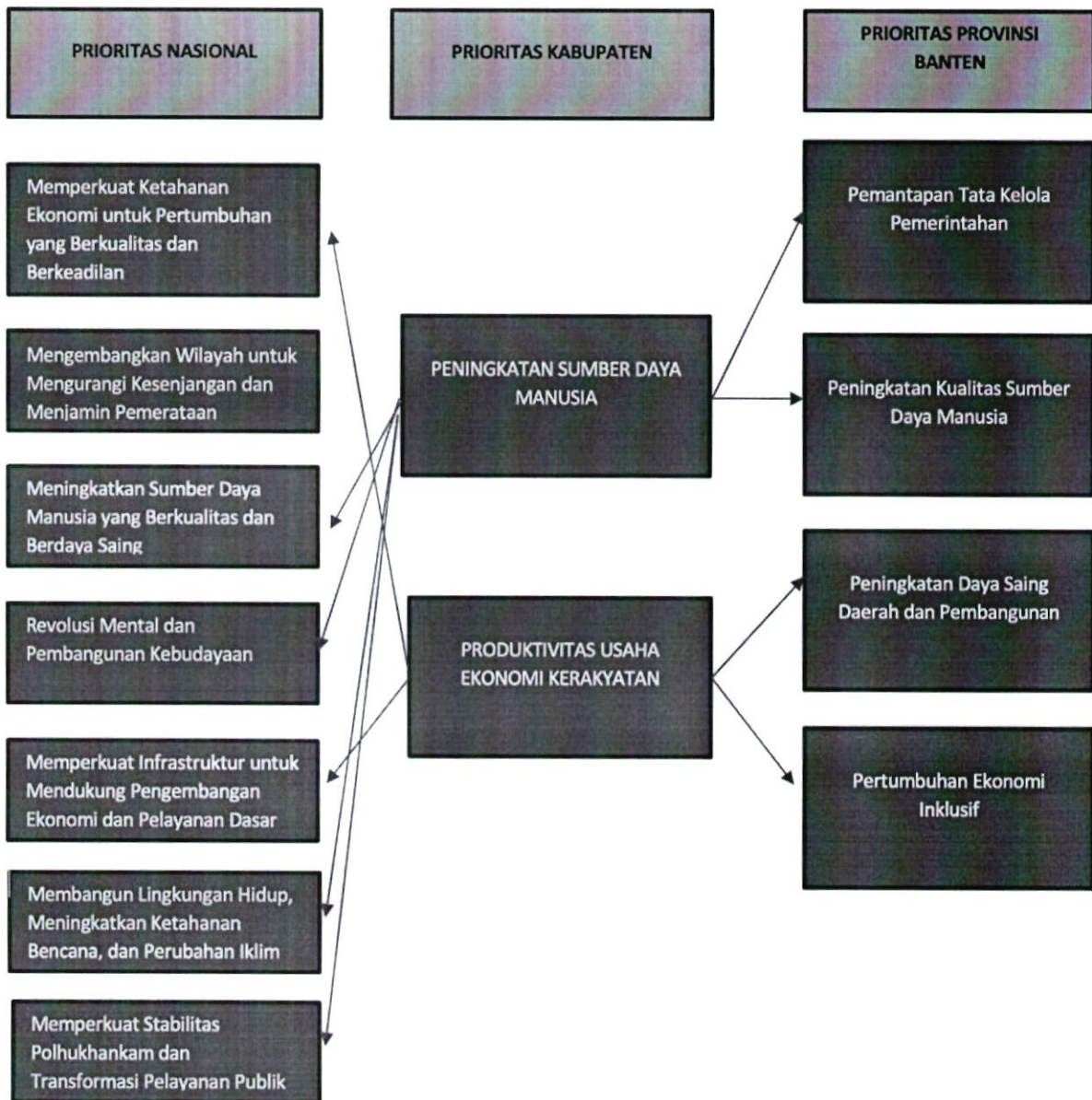
Penyelarasan Tema Pembangunan RKP 2022



4.2.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Banten Terhadap Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Keterkaitan prioritas pembangunan antara Pemda Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional merupakan hal yang sangat penting. Dibawah ini disajikan sinkronisasi prioritas pembangunan

Gambar 4.3
Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Banten Tahun 2022



4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022, Pembangunan tahun 2022 diarahkan pada "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan" maka diperlukan keselarasan antara isu strategis dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang yang telah ditetapkan. Gambaran tentang keselarasan isu strategis 2022 dengan prioritas pembangunan Tahun 2022:

Isu Strategis Kabupaten Tangerang Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial;
2. Peningkatan Aktivitas Ekonomi Kerakyatan;
3. Penguatan Ketahanan Pangan; dan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2022, terdiri dari :

- a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 1) Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - Pembangunan RSUD Tigaraksa;
 - Sanitasi Pesantren (Sanitren);
 - Pengembangan Kampung Tematik;
 - Penanganan Kawasan Kumuh;
 - Penanganan Sampah;
 - Penanganan Banjir;
 - Peningkatan nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat yang religius;
 - Penyediaan beasiswa bagi siswa MBR berprestasi;
 - Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM);
 - Peningkatan pendidikan kesetaraan;
 - Pengembangan perpustakaan;
 - Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan;
 - Penanganan kesehatan pasca pandemi Covid-19;

- Penanganan stunting;
 - Percepatan Desa ODF ;
 - Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tigaraksa;
 - Percepatan eliminasi TB;
 - Pencegahan HIV;
 - Pemenuhan jaminan kesehatan MBR dengan data terintegrasi;
 - Penanganan kawasan dan permukiman kumuh;
 - Pengelolaan dan pengurangan sampah;
 - Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan;
 - Pelayanan KB;
 - Pengembangan akses infrastruktur pendukung pendidikan dan kesehatan.
- 2) Perlindungan sosial;
- Optimalisasi Rumah Singgah untuk ODGJ;
 - Pengarustamaan gender;
 - Pemberdayaan perempuan;
 - Pemenuhan hak anak; dan
 - Kesiapsiagaan Bencana.
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan
- *SIAK terintegrasi;*
 - *Optimalisasi Pelayanan berbasis Digital;*
 - *Pelayanan Berbasis IT;*
 - *Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE);*
 - *Penerapan Smart City;*
 - *Penerapan Tangerang Satu Data;*
 - *Peningkatan Kinerja SDM; dan*
 - *Penataan Kelembagaan Organisasi.*
- b. *Produktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan*
- 1) Penguatan ketahanan pangan;
- Pembangunan Pusat Holtikultura;
 - Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat;
 - Peningkatan akses distribusi dan produksi di sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan perternakan;
 - Peningkatan kapasitas air baku dan sumber daya air yang

menunjang sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;

- Peningkatan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- Pembangunan pusat hortikultura;
- Peningkatan kapasitas Balai Benih (Perikanan, Pertanian, Peternakan);
- Peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes);
- Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat dalam program ketahanan pangan;
- Inovasi dan rekayasa teknologi pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan;
- Penyediaan tanaman pangan bagi rumah tangga ;
- Pengembangan tanaman pangan lestari;
- Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga dan Kelompok Wanita Tani;
- Mengoptimalkan lahan pekarangan sendiri.

2) Peningkatan aktivitas ekonomi

- Pembangunan Usaha Mikro;
- Pengembangan Kawasan Pesisir;
- Penguatan akses permodalan dan pemasaran sektor Usaha Mikro dan industri kecil menengah (IKM);
- Penguatan akses permodalan dan pemasaran sektor Ekonomi Kreatif;
- Peningkatan jumlah wirausaha baru (WUB);
- Peningkatan dan penumbuhkembangan koperasi;
- Peningkatan kapasitas BLK;
- Peningkatan kemudahan pelayanan perijinan usaha bagi sektor UMKM/IKM, dan Wira Usaha Baru;
- Peningkatan omset IKM/Usaha Mikro;
- Digitalisasi Produk Industri Kecil Menengah;
- Pengembangan destinasi wisata kabupaten Tangerang.

4.2.4 Program Unggulan

Pemerintah Kabupaten Tangerang mencanangkan “Program Unggulan” sebagai program pembangunan daerah yang merupakan program monumental berbasis isu strategis untuk mendongkrak langsung pencapaian Visi Misi yang diusung Kepala Daerah. Program ini menjadi program prioritas bersifat strategik yang berorientasi terhadap pencapaian sasaran pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Tangerang secara konsisten telah dan akan mengawal serta melaksanakan program unggulan yang awalnya 15 (lima belas) menjadi 10 (sepuluh) program unggulan sebagai program yang bersifat lintas sektor dan lintas OPD, dengan disederhanakannya menjadi 10 (sepuluh) program unggulan, program tersebut dapat menuntaskan permasalahan daerah secara sinergis dan terintegrasi. Program ini dimaksudkan untuk menangani permasalahan yang penting, mendesak dan berpengaruh besar terhadap tatanan masyarakat dan penanganannya memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Adapun realisasi sampai dengan tahun 2021 dan target sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Capaian dan Target Program Unggulan Tahun 2019-2023

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian sd 2021	Target		Target Akhir	OPD
					2019	2020	2021		2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	TANGERANG RELIGI	Insentif Guru Ngaji	Tersedianya Penerima Insentif Guru Ngaji	Orang/ Tahun	3.014	3.288	3.562	9.864	3.836	4.110	17.810	Kesra Setda
		Pengembangan Diri Siswa Baca Tulis Al Qur'an	Jumlah peserta didik SD dan SMP yang dapat Baca Tulis Al Qur'an	Siswa	0	-	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	Disdik

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian sd 2021	Target		Target Akhir	OPD
					2019	2020	2021		2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pembangunan sarana Sanitasi Pada Pondok Pesantren	Jumlah Pondok Pesantren yang mendapatkan bantuan	pondok pesantren	196	0	150	346	125	125	596	Kesra Setda
		Peningkatan Pembangunan Sektor Ekonomi di Pondok Pesantren	Jumlah Pontren dibina pada bidang pertanian	pondok pesantren	-	-	-	-	10	10	20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Jumlah Pontren dibina dari sektor perekonomian bidang Perikanan	pondok pesantren	-	-	-	-	20	20	40	Dinas Perikanan
			Jumlah Pontren dibina PHBS	pondok pesantren	40	46	100	186	150	150	486	Dinkes
2	GERAKAN SEKOLAH MENYENANGKAN (GSM)	Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang dibangun	USB	5	0	0	5	2	2	11	Disdik
		Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang dibangun	Ruang	293	47	13	353	110	50	517	Disdik
		Rehabilitasi Sedang/berat bangunan Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	Ruang	286	28	72	386	66	50	479	Disdik

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian sd 2021	Target		Target Akhir	OPD
					2019	2020	2021		2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Beasiswa Pendidikan Berprestasi dan MBR	Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa	orang	-	1.154	2.583	3.737	4.590	4.000	12.334	Disdik
		Fasilitasi Sekolah Ramah Anak	Jumlah sekolah dibina menjadi ramah anak	sekolah	77	152	250	479	250	250	929	DP3A
		Sekolah SEHATI	jumlah sekolah SD/SMP yang menerapkan program Sehati	sekolah	0	13	30	43	30	30	103	DLHK, Dinas Pertanian
3	GERAKAN TANGERANG SEHAT	Kemitraan Pengobatan bagi pasien kurang mampu (Jamkesda)	Jumlah pasien yang mendapatkan bantuan pengobatan melalui Jamkesda	orang	15.186	6.549	5.202	26.937	2.400	2.600	29.085	DINKES
		Kemitraan Pengobatan bagi pasien kurang mampu (BPJS PBI)	Jumlah pasien yang mendapatkan bantuan pengobatan melalui BPJS PBI	orang	89.289	83.403	90.088	262.780	90.000	100.000	462.692	DINKES
		Aksi Konvergensi Stunting	Jumlah Balita Stunting Di intervensi	persen	12	8,5	18	18	16	14	14	DINKES, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Sosial, DPPKB Dan Disdik,

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian sd 2021	Target		Target Akhir	OPD
					2019	2020	2021		2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												DPPPA, DPPP
		Desa bebas <i>ODF</i> (<i>open defecation free</i>)	Jumlah desa ODF	Desa	0	21	10	31	69	100	100	Pemdes,Perkim dan Dinkes
		Pembangunan RSUD Tigaraksa :										-
		a.Feasibility study	Jumlah dokumen FS	Dokumen	1	0	0	1	0	0	1	DINKES
		b. Master plan dan Detail engineering design	Jumlah dokumen <i>Master plan</i>	Dokumen	0	1 (masterplan)	1 (DED)	2	0	0	2	DINKES
		c. penyediaan lahan	Luas Lahan	M ²	0	5844	36784	42.628	50000	0	50.000	DINKES
		d. pembangunan	Jumlah Bangunan yang dibangun	Unit	-	0	0		4 (Gd Utama, Penunjang, IPRS, Ground Tank)	6 (Penunjang Lanjutan)	10	DINKES

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian sd 2021	Target		Target Akhir	OPD
					2019	2020	2021		2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Alat Kesehatan & Sarpras	Jumlah Paket Alat Kesehatan & Sarpras	Jenis	-	0	0		0	250	250	DINKES
		Sumber Daya Kesehatan	Jumlah Jenis Tenaga Kesehatan & Non Kesehatan	Orang	-	0	0		0	150	150	DINKES
		Obat dan BMHP	Jumlah Paket Obat & BMHP	Paket	-	0	0		0	2	2	DINKES
		Puskesmas Ramah Anak	Jumlah puskesmas yang dibina menjadi ramah anak	puskesmas	7	11	22	22	33	44	117	DINKES dan DPPPA
		Olahraga bersama Masyarakat dan Pelajar	Jumlah kelompok masyarakat dan pelajar yang berolahraga bersama	Kelompok	643	1.093	35	1.771	400	427	2.913	Kecamatan, Disporabudpar
			Jumlah kegiatan olahraga masyarakat dan pelajar	Kegiatan	-	-	-		5	5	10	Kecamatan, Disporabudpar
4	TANGERANG MANDIRI TAHAN PANGAN (TANGERANG MANTAP)	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Jumlah produksi Holtikultura di kawasan Agropolitan	Ton	775	780	878,7	-	870	870	4.165	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian sd 2021	Target		Target Akhir	OPD
					2019	2020	2021		2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian	Jumlah sarana dan prasarana Produksi Pertanian di Kawasan Agropolitan	Jenis		12	14	26	14	14	14	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Jumlah luasan pertanian yang diberikan bantuan	Ha	100	100	163	163	163	163	163	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Pelaksanaan Pembangunan Pusat Hortikultura :	pembangunan pusat hortikultura	Persen	0	0	50	50	20	30	100	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN, DTRB
		1. Desain Pusat Hortikultura	Jumlah dokumen DED	DED	0	1	0	1	0	0	1	DTRB
		2. Pembangunan Pusat Hortikultura	Jumlah pusat hortikultura	Unit	0	0	1	1	0	0	1	DTRB
		3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Hortikultura	Jumlah sarana dan prasarana pusat Hortikultura	Paket	0	0	0	-	1	0	1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Pemberian Insentif pada Lahan LP2B	Luas lahan LP2B yang diberikan bantuan	Ha		3.228,49	4.890,56	8.119	4.466,45	1.345,20	13.930,70	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian sd 2021	Target		Target Akhir	OPD
					2019	2020	2021		2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pekarangan Pangan Lestari (PPL)	Jumlah kelompok PPL	Kelompok	13	45	10	68	10	10	88	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Pembangunan Daerah Irigasi	Lahan Pertanian Berkelanjutan Yang Terlayani Irigasi	Daerah Irigasi (DI)	1	0	5	6	8	4	18	DBMSDA
5	GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PANTAI (GERBANG MAPAN)	Konservasi Penanaman Mangrove	Jumlah Ha lokasi penanaman (Persentase Luasan Penanaman Mangrove)	Luasan (persentase)	3%	6%	9%	9%	12%	15%	15%	DLHK, Dinas Perikanan
		Pembangunan WANA WISATA TMC	% kaWASAN Wana wisata TMC terbangun	%	1	0	70%	70%	100%	100%	100%	DTRB
		Pembangunan Sentra Budidaya Perikanan (<i>Urban Aqua Cultur</i>)	%Terlaksananya Urban Aqua Cultur di Desa Ketapang	Persen	34%	48%	55%	55%	76%	86%	86%	DINAS PERIKANAN
		1. Desain Urban Aqua Cultur	Jumlah dokumen	DED/FS	1	-	-	1	0	0	1	DINAS PERIKANAN
		2. Pembangunan Urban Aqua Cultur	Jumlah Unit Urban Aqua Cultur yang dibangun	Unit	0	1	-	1	0	0	1	DINAS PERIKANAN

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian sd 2021	Target		Target Akhir	OPD
					2019	2020	2021		2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3. Penataan Lahan Urban Aqua Cultur	Presentase Luasan Urban Aqua Cultur yang ditata	Persen	34%	48%	55%	55%	76%	86%	86%	DINAS PERIKANAN
		4. Pemeliharaan dan Operasionalisasi KUA	Porsentase yang dipelihara	Persen	0	0	20%	0	20%	20%	60%	DINAS PERIKANAN
		Pemberdayaan Budidaya Ikan	Jumlah orang yang diberdayakan	orang	170	220	150	540	150	150	840	DINAS PERIKANAN
			Jumlah unit kolam	unit kolam bulat	50	170	0	220	40	40	300	DINAS PERIKANAN
		Pemberdayaan Budidaya Ikan Hias	Jumlah orang yang diberdayakan	orang	10	10	10	30	10	10	50	DINAS PERIKANAN
		Pemberdayaan Nelayan	Jumlah nelayan yang diberdayakan	Nelayan	110	24	150	284	150	150	584	DINAS PERIKANAN
			Jumlah alat penangkap ikan(API)	unit api	3500	3905	3500	10.905	3500	3500	17.905	DINAS PERIKANAN
		Pemberdayaan Pengolah Ikan	Jumlah Pengolah Yang dilatih	Kelompok	10	10	10	30	10	10	50	DINAS PERIKANAN
			Jumlah Bantuan Sarana Pengolahan ikan	Unit	10	10	10	30	10	10	50	DINAS PERIKANAN

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian sd 2021	Target		Target Akhir	OPD
					2019	2020	2021		2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Sarana Prasarana Terbangun	Kawasan	-	-	2 (Tanjung Anom, Marga Mulya Mauk)	2			2	Perkim Dan Bappeda
			Jumlah DED	DED	-	-	1 (Cituis)	1		1	1	Perkim Dan Bappeda
6	OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN MANAJEMEN ASSET (OPTIMA)	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	persentase realisasi penyelenggaraan perijinan secara online dan terintegrasi	Persen	37	40	71,43	60	80	100	100	DPMPSTP
		Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Persentase Sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi	Persen			21	21	50	75	75	DISKOM

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian sd 2021	Target		Target Akhir	OPD
					2019	2020	2021		2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		pengelolaan manajemen aset terintegrasi	Persentase pengelolaan manajemen aset terintegrasi	Persen					80	100	100	BPKAD
		pengelolaan pendapatan daerah terintegrasi	Persentase pengelolaan pendapatan daerah terintegrasi	Persen			80	80	80	100	100	BAPENDA
		pengelolaan manajemen SDM terintegrasi	Persentase pengelolaan manajemen SDM terintegrasi	Persen					80	100	100	BKPSDM
		pengelolaan perencanaan dan monev terintegrasi	Persentase pengelolaan perencanaan dan monev terintegrasi	Persen					80	100	100	BAPPEDA
		operasionalisasi e-office	Persentase operasionalisasi e-office	Persen			84	84	80	100	100	DISKOMINFO
		integrasi data kependudukan	Persentase integrasi data kependudukan	Persen					50	80	80	Disdukcapil
		integrasi pengelolaan perijinan	Persentase integrasi pengelolaan perijinan	Persen					80	100	100	DPMPST
		Peningkatan Sistem Aplikasi Pengelolaan Aset	Persentase sistem aset yang dikembangkan	Persen	50	60	70	70	80	100	100	BPKAD

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian sd 2021	Target		Target Akhir	OPD
					2019	2020	2021		2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pembangunan Sistem Informasi pengelolaan PAD Terintegrasi	Persentase sistem pengelolaan PAD yang terintegrasi	Persen	50	60	80	80	80	100	100	BAPENDA
7	GEBRAK PAKUMIS PLUS (GERAKAN BERSAMA RAKYAT ATASI KAWASAN PADAT KUMUH DAN MISKIN)	Bedah rumah berbasis Kawasan	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	rumah	1.000	1.000	1.222	3.222	1.222	1.300	5.744	DINAS PERKIM
			Pengurangan Kawasan Kumuh	Kawasan	190	170	150	510	110	90	710	DINAS PERKIM
		Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di kawasan kumuh	Jumlah kelompok P2L	Kelompok	13	45	10	68	10	10	88	Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan
		Pengembangan budi daya perikanan dikawasan kumuh	Jumlah pengembangan budi daya perikanan di Kawasan kumuh yang mendapatkan program perikanan	Kelompok	0	0	0		10	10	20	Perikanan

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian sd 2021	Target		Target Akhir	OPD
					2019	2020	2021		2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengadaan Air Minum berbasis Kawasan	Jumlah Rumah tangga penerima air bersih	SR	350	490	346	1.186	500	500	2.290	DINAS PERKIM
		Sanitasi Masyarakat Berbasis Kawasan	Jumlah SR yang dibangun	SR	132	100	521	753	100	100	532	DINAS PERKIM
8	KITA PEDULI PERMASALAHAN SAMPAH (KIPRAH)	Optimalisasi TPS 3 R persampahan	Jumlah TPS 3 R yang dibina	TPS3R	5	5	5	15	3	2	20	DLHK
		Penyediaan Prasarana dan Sarana pengelolaan Persampahan	Jumlah bank sampah yang dibina	Bank Sampah	31	19	10	60	10	10	80	DLHK
		Koordinasi dan Fasilitasi pengelolaan sampah berbasis bio conversi maggot	jumlah kelompok pengelola	Kelompok	0	0	19	19	20	20	59	Bappeda dan DLHK
		Revitalisasi TPA Jatiwaringin	persentase pengelolaan sampah berbasis waste to energy (Refuse derived fuel)	Persen	0	0	10	10	25	30	30	DLHK

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian sd 2021	Target		Target Akhir	OPD
					2019	2020	2021		2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	PENGENDALIAN KEMACETAN LALU LINTAS (PEKATLANTAS)	Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System)	Terbangunnya ATCS	titik	0	0	0	-	1	1	2	DISHUB
		FS ATCS	Tersedianya FS ATCS	dokumen	1	0	0	1	0	0	1	DISHUB
		DED ATCS	Tersedianya DED ATCS	dokumen	1	0	0	1	0	0	1	DISHUB
		Pembangunan/Pe ningkatan Jalan Kabupaten	Prosentase Infrastruktur jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	persen	88,55	87,55	90,74	90,74	90,57	92,08	92,08	DBMSDA
		Penanganan kemacetan lalu lintas	Titik kemacetan yang tertangani	Titik	2	3	4	9	4	5	5	DISHUB
10	PRODUK INOVATIF DAN KREATIF (PROAKTIF)	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pentas seni dan budaya	Kegiatan	22	0	8	30	5	5	40	DISPORA
		Bantuan Promosi Usaha Mikro	Usaha Mikro yang dipromosikan	Usaha Mikro	270	270	270	810	300	300	1410	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Fasilitasi Usaha mikro	Fasilitasi Usaha Mikro di GTG dan di Lokasi Destinasi Wisata	Lokasi	0	0	0	-	3	3	6	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian sd 2021	Target		Target Akhir	OPD
					2019	2020	2021		2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Optimalisasi GTG	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Rumah Kemasan	UM/IKM	0	0	50	50	200	200	400	INDAG/Diskum
			Pengembangan produksi UM dan IKM	UM/IKM	0	0	0	-	25	25	50	INDAG/Diskum
			Pengembangan E-commerce Kabupaten Tangerang	Persen	0	0	0	-	50	100	100	Diskominfo/Indag/Diskum
		pengembangan kluster Usaha Mikro	Terbentuknya kluster Usaha Mikro	kluster	0	0	0	-	1 (kluster Craft)	1 (klaster Makan Minum)	2	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pembiayaan	koperasi	17	12	12	41	12	12	65	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UMKM	Jumlah umkm yang mendapatkan pembiayaan	UMKM	4989	5000	1500	11.489	1500	1500	14489	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Penilaian Koperasi yang Sehat	Jumlah koperasi yang sehat	koperasi	90	90	30	210	30	30	270	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Program Unggulan	Indikasi Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian sd 2021	Target		Target Akhir	OPD
					2019	2020	2021		2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inovasi masyarakat	jumlah inovasi masyarakat yg terfasilitasi	Inovasi	3	0	9	12	9	9	30	Bappeda, DPMPD
		Digitalisasi Pelayanan UTTP	Presentase Pelaku Usaha yang di layani Secara Digital (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya)	Persen	0	0	100	100	60	75	75	INDAG
		kampung tematik	jumlah kampung tematik terbina	Lokasi	0	0	2	2	2	2	4	bappeda, dpmpd, pertanian, perikanan, perkim, Diskum

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2022 berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang pada Tahun 2022 dan evaluasi tahun berjalan (triwulan 2 Tahun 2022) dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Adapun ruang lingkup perubahan RKPD Tahun 2022 berdasarkan beberapa hal yaitu :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 yang harus digunakan untuk tahun berjalan;
2. Penyesuaian target PAD disebabkan oleh penyesuaian target PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah asli yang sah yang berdasarkan evaluasi tahun berjalan perlu disesuaikan dan dimaksimalkan untuk penganggaran perencanaan pembangunan daerah;
3. Penyesuaian belanja bagi BLUD karena perubahan target pendapatan BLUD tahun 2022.
4. Pemenuhan gaji selama 14 bulan dan Tunjangan Kinerja selama 12 bulan untuk ASN, serta tambahan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ke-13 sebesar 50 persen dari Tunjangan Kinerja berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas kepada ASN, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022
5. Pemenuhan THR Non ASN.
6. Terbitnya Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.120-Huk/2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 yang mengalokasikan Bantuan Keuangan sebesar Rp.10.000.000.000,- yang dimanfaatkan untuk peningkatan infrastruktur jalan dan penanganan banjir.
7. Pemenuhan Belanja Operasional berupa kegiatan rutin yang belum teranggarkan selama satu tahun, antara lain pembayaran listrik, telpon, BOP Kebersihan, pemeliharaan PJU dan lain-lain

8. Pemenuhan Program Prioritas dan Unggulan antara lain pembangunan dan peningkatan jalan, penanganan dan pencegahan banjir, operasional Pusagro, pemenuhan Jamkesda dan lainnya
9. Peningkatan layanan masyarakat berupa penyediaan alat rekam dan printer KTP elektronik
10. Kabupaten Tangerang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pamsea dan CSS tahun 2022, sehingga perlu dianggarkan kegiatan pendukung baik di OPD teknis maupun kecamatan.
11. Penyesuaian kegiatan yang bersumber dari DAK karena terbitnya Juknis pelaksanaan kegiatan DAK tahun 2022
12. Rencana pelaksanaan beberapa kegiatan multiyears yaitu Pembangunan RSUD Tigaraksa, Pembangunan Jalan Layang Cisauk serta Pembangunan Smart Building dan Gedung Kesbangpol
13. Penyesuaian Belanja Bagi Hasil yang bersumber dari peningkatan target Pajak dan Retribusi
14. Kegiatan lintas sector untuk pengentasan kemiskinan.
15. Pergeseran antar program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdasarkan hasil evaluasi perlu dilakukan pada tahun berjalan.

Adapun rincian program dan kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatif setiap OPD tercantum dalam lampiran 1.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Berdasarkan Perangkat Daerah

No	Kode Rekening	Perangkat Daerah	RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022	Selisih	(%)
1	1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	1.704.008.120.620	1.764.399.002.700	60.390.882.080	103,54
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	586.581.322.256	670.749.000.486	84.167.678.230	114,35
3	1.02.0.00.0.00.01.0044	RSUD Pakuhaji	78.051.839.584	95.231.295.146	17.179.455.562	122,01
4	1.02.0.00.0.00.01.0046	RSUD Balaraja	187.086.181.400	224.677.317.822	37.591.136.422	120,09
5	1.02.0.00.0.00.01.0047	RSUD Kabupaten Tangerang	328.845.610.452	536.784.516.338	207.938.905.886	163,23
6	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	301.733.517.950	367.461.235.343	65.727.717.393	121,78
7	1.03.0.00.0.00.02.0000	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	250.097.423.701	234.179.234.455	15.918.189.246	93,64
8	1.04.1.05.0.00.01.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33.715.258.326	37.682.228.411	3.966.970.085	111,77
9	1.04.2.10.1.03.01.0000	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman	363.367.818.239	401.049.627.552	37.681.809.313	110,37
10	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	20.116.697.630	22.850.671.175	2.733.973.545	113,59
11	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	21.815.635.150	25.098.811.052	3.283.175.902	115,05
12	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja	17.855.456.494	18.913.488.845	1.058.032.351	105,93
13	2.08.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.599.273.124	11.705.200.899	1.105.927.775	110,43

No	Kode Rekening	Perangkat Daerah	RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022	Selisih	(%)
14	2.11.1.03.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	87.338.523.808	107.720.966.958	20.382.443.150	123,34
15	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.262.133.591	26.458.535.695	7.196.402.104	137,36
16	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	33.135.833.150	37.769.836.365	4.634.003.215	113,98
17	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	36.614.048.567	37.114.846.871	500.798.304	101,37
18	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	62.811.332.530	74.045.922.551	11.234.590.021	117,89
19	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	56.973.603.676	59.826.859.727	2.853.256.051	105,01
20	2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	14.939.571.059	17.400.859.107	2.461.288.048	116,47
21	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.889.748.853	21.485.418.908	404.329.945	98,15
22	2.19.2.22.3.26.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	52.225.737.740	53.881.334.303	1.655.596.563	103,17
23	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Arsip	15.181.167.751	18.009.130.101	2.827.962.350	118,63
24	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	17.612.924.973	19.794.443.522	2.181.518.549	112,39
25	3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	33.574.477.032	37.286.029.586	3.711.552.554	111,05
26	3.31.3.30.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.312.698.280	24.222.839.488	1.910.141.208	108,56

No	Kode Rekening	Perangkat Daerah	RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022	Selisih	(%)
27	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	134.161.152.027	147.831.424.184	13.670.272.157	110,19
28	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	123.314.235.166	125.162.422.758	1.848.187.592	101,50
29	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28.086.421.771	31.869.176.023	3.782.754.252	113,47
30	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pendapatan Daerah	88.161.745.817	114.655.663.232	26.493.917.415	130,05
31	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	35.226.173.929	57.853.768.466	22.627.594.537	164,24
32	5.02.0.00.0.00.03.0000	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	681.138.903.841	710.141.921.541	29.003.017.700	104,26
33	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25.496.712.660	27.420.715.897	1.924.003.237	107,55
34	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Kabupaten	30.742.446.974	34.467.522.999	3.725.076.025	112,12
35	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tigaraksa	19.851.687.700	20.932.648.698	1.080.960.998	105,45
36	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Cikupa	20.876.530.536	21.592.241.266	715.710.730	103,43
37	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Panongan	16.102.539.932	16.994.278.932	891.739.000	105,54
38	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Curug	31.459.636.554	32.152.894.731	693.258.177	102,20
39	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Legok	15.045.044.716	15.597.784.750	552.740.034	103,67

No	Kode Rekening	Perangkat Daerah	RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022	Selisih	(%)
40	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Pasar Kemis	37.150.105.528	38.867.952.673	1.717.847.145	104,62
41	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Balaraja	13.751.977.324	14.529.377.278	777.399.954	105,65
42	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Kresek	10.286.445.790	11.027.421.594	740.975.804	107,20
43	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Kronjo	12.027.086.220	13.238.465.935	1.211.379.715	110,07
44	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Mauk	17.295.345.736	19.891.696.296	2.596.350.560	115,01
45	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Rajeg	16.727.984.283	17.135.057.146	407.072.863	102,43
46	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Sepatan	15.030.743.726	15.453.698.273	422.954.547	102,81
47	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Teluknaga	17.426.493.625	18.084.071.132	657.577.507	103,77
48	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Cisoka	12.977.545.942	13.569.702.585	592.156.643	104,56
49	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Pakuhaji	16.273.563.660	17.123.335.009	849.771.349	105,22
50	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Kosambi	24.667.595.534	25.531.509.935	863.914.401	103,50
51	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Pagedangan	18.253.706.087	18.839.192.387	585.486.300	103,21
52	7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Jambe	10.690.257.519	11.057.876.490	367.618.971	103,44

No	Kode Rekening	Perangkat Daerah	RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022	Selisih	(%)
53	7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Jayanti	9.810.220.486	10.415.372.969	605.152.483	106,17
54	7.01.0.00.0.00.20.0000	Kecamatan Kemiri	10.734.715.398	10.899.336.730	164.621.332	101,53
55	7.01.0.00.0.00.21.0000	Kecamatan Sukadiri	11.367.928.810	12.043.444.106	675.515.296	105,94
56	7.01.0.00.0.00.22.0000	Kecamatan Cisauk	17.161.324.337	17.886.113.124	724.788.787	104,22
57	7.01.0.00.0.00.23.0000	Kecamatan Sepatan Timur	11.765.517.683	12.419.915.121	654.397.438	105,56
58	7.01.0.00.0.00.24.0000	Kecamatan Sindang Jaya	10.405.802.681	11.160.072.641	754.269.960	107,25
59	7.01.0.00.0.00.25.0000	Kecamatan Kelapa Dua	34.717.837.303	35.593.682.276	875.844.973	102,52
60	7.01.0.00.0.00.26.0000	Kecamatan Solear	9.589.796.562	9.683.032.388	93.235.826	100,97
61	7.01.0.00.0.00.27.0000	Kecamatan Mekar Baru	10.249.437.080	11.126.462.657	877.025.577	108,56
62	7.01.0.00.0.00.28.0000	Kecamatan Sukamulya	10.685.694.210	10.634.815.236	50.878.974	99,52
63	7.01.0.00.0.00.29.0000	Kecamatan Gunung Kaler	9.617.883.778	10.239.814.407	621.930.629	106,47
64	8.01.0.00.0.00.01.0000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	14.420.273.720	14.842.303.248	422.029.528	102,93
JUMLAH			6.010.494.470.581	6.703.764.838.519	693.270.367.938	

Tabel 5.2

Rekapitulasi Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Berdasarkan Bidang Urusan dan Program

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD		
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
1	1						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.704.008.120.620	1.764.399.002.700	103,54			
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	950.324.613.854	972.745.837.513	102,36	Dinas Pendidikan
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	753.211.540.166	791.181.198.587	105,04	Dinas Pendidikan
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	471.966.600	471.966.600	100,00	Dinas Pendidikan
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.171.264.784.573	1.517.801.096.814	129,59	
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	711.197.693.652	997.568.295.926	140,27	Dinas Kesehatan
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	454.518.395.501	514.631.125.268	113,23	Dinas Kesehatan
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.966.730.100	1.905.505.100	96,89	Dinas Kesehatan
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	639.806.320	639.806.320	100,00	Dinas Kesehatan
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.942.159.000	3.056.364.200	103,88	Dinas Kesehatan
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	301.733.517.950	367.461.235.343	121,78	
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.075.822.022	34.222.039.415	121,89	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD		
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	64.817.603.037	82.562.603.037	127,38	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1	3	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	208.840.092.891	250.676.592.891	120,03	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	250.097.423.701	234.179.234.455	93,64	
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.744.757.452	22.744.757.452	100,00	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	217.252.754.264	201.334.565.018	92,67	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	5.974.376.754	5.974.376.754	100,00	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
1	3	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.125.535.231	4.125.535.231	100,00	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	33.715.258.326	37.682.228.411	111,77	
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.425.017.526	24.765.016.526	110,43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.821.919.900	1.921.919.900	105,49	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	9.468.320.900	10.995.291.985	116,13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	144.572.267.301	148.077.267.301	102,42	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD		
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	55.178.163.001	55.738.163.001	101,01	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.927.676.300	6.927.676.300	140,59	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	84.466.428.000	85.411.428.000	101,12	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	67.575.947.801	71.829.112.362	106,29	
1	4	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.421.946.015	16.475.110.576	122,75	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.526.715.400	1.526.715.400	100,00	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.258.441.386	2.258.441.386	100,00	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1	4	4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	35.693.759.400	36.893.759.400	103,36	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	14.675.085.600	14.675.085.600	100,00	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	142.133.938.179	171.966.082.931	120,99	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD		
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
2	10	0	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	142.133.938.179	171.966.082.931	120,99	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.582.159.800	1.582.159.800	100,00	
1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.582.159.800	1.582.159.800	100,00	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.797.105.158	2.797.105.158	100,00	
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.797.105.158	2.797.105.158	100,00	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.706.400.000	4.797.900.000	101,94	
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.706.400.000	4.797.900.000	101,94	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	20.116.697.630	22.850.671.175	113,59	
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.672.292.570	20.906.266.115	111,96	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.444.405.060	1.944.405.060	134,62	Satuan Polisi Pamong Praja
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	20.990.032.850	24.196.688.752	115,28	
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.715.947.480	10.911.123.382	112,30	Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD		
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	395.542.300	545.542.300	137,92	Dinas Sosial
1	6	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	25.010.000	25.010.000	100,00	Dinas Sosial
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.442.947.200	1.402.427.200	97,19	Dinas Sosial
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.189.903.100	7.079.903.100	136,42	Dinas Sosial
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	723.529.900	723.529.900	100,00	Dinas Sosial
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	3.497.152.870	3.509.152.870	100,34	Dinas Sosial
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	825.602.300	902.122.300	109,27	
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	825.602.300	902.122.300	109,27	Dinas Sosial
2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	14.282.345.794	15.322.378.145	107,28	
2	7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.063.184.014	12.071.716.365	109,12	Dinas Tenaga Kerja
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	299.185.000	299.185.000	100,00	Dinas Tenaga Kerja
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.560.649.780	1.583.149.780	101,44	Dinas Tenaga Kerja
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.359.327.000	1.368.327.000	100,66	Dinas Tenaga Kerja
2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.573.110.700	3.591.110.700	100,50	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD		
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.573.110.700	3.591.110.700	100,50	Dinas Tenaga Kerja
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.599.273.124	11.705.200.899	110,43	
2	8	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.530.132.924	8.636.060.699	114,69	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.114.446.700	1.114.446.700	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	472.382.000	434.882.000	92,06	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	308.276.800	308.276.800	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	31.899.700	31.899.700	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	727.469.300	727.469.300	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan		
2 8 7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	414.665.700	452.165.700	109,04	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.300.000.000	-	0,00	
1 3 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.300.000.000	-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	49.832.897.299	62.457.291.949	125,33	
2 11 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.155.030.818	22.970.348.418	119,92	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.044.818.895	1.604.618.895	153,58	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.200.592.000	2.598.842.000	216,46	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	8.942.021.000	11.930.657.000	133,42	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	424.147.186	424.147.186	100,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	19.066.287.400	22.928.678.450	120,26	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan		
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.056.405.000	2.649.366.000	128,83	
2 11 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.056.405.000	2.649.366.000	128,83	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.365.816.000	3.045.156.000	128,71	
2 11 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.365.816.000	3.045.156.000	128,71	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.713.281.000	3.488.886.000	128,59	
2 11 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.713.281.000	3.488.886.000	128,59	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.719.820.000	3.495.502.500	128,52	
2 11 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.719.820.000	3.495.502.500	128,52	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.962.220.000	2.553.756.000	130,15	
2 11 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.962.220.000	2.553.756.000	130,15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.209.884.000	2.883.648.000	130,49	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD		
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
2	11	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.209.884.000	2.883.648.000	130,49	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.933.770.000	2.517.027.000	130,16	
2	11	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.933.770.000	2.517.027.000	130,16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.357.377.000	3.062.598.000	129,92	
2	11	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.357.377.000	3.062.598.000	129,92	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.788.113.000	3.604.125.000	129,27	
2	11	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.788.113.000	3.604.125.000	129,27	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	5.577.553.870	7.203.603.870	129,15	
2	11	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.577.553.870	7.203.603.870	129,15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.927.717.860	2.094.467.860	108,65	
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.927.717.860	2.094.467.860	108,65	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD		
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	7.593.668.779	8.665.538.779	114,12	
2	11	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.593.668.779	8.665.538.779	114,12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	19.262.133.591	26.458.535.695	137,36	
2	12	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.645.530.491	18.589.588.775	126,93	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.264.693.800	4.206.383.700	185,74	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.448.883.600	1.448.883.600	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	884.830.800	2.195.484.720	248,12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	18.194.900	18.194.900	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	33.135.833.150	37.769.836.365	113,98	
2	13	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.287.302.574	11.353.305.789	110,36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD		
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	6.546.320.576	8.346.320.576	127,50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	16.302.210.000	18.070.210.000	110,85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	36.614.048.367	37.114.846.871	101,37	
2	14	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.967.304.547	12.468.102.851	104,18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	984.404.220	984.404.220	100,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.944.924.000	6.944.924.000	100,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	16.717.415.800	16.717.415.800	100,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	58.956.510.620	69.941.100.641	118,63	
2	15	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.720.205.539	29.138.647.585	117,87	Dinas Perhubungan
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	34.236.305.081	40.802.453.056	119,18	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan		
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3.244.879.910	609.942.000	18,80	
2 15 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.244.879.910	609.942.000	18,80	Dinas Perhubungan
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	609.942.000	3.494.879.910	572,99	
2 15 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	609.942.000	3.494.879.910	572,99	Dinas Perhubungan
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFORMATIKA	34.029.917.587	36.884.114.238	105,28	
2 16 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.121.630.287	13.437.802.038	120,83	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.565.251.400	3.643.151.400	102,18	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	39.343.035.900	39.803.160.800	101,17	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	410.763.800	410.763.800	100,00	
2 20 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	410.763.800	410.763.800	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.532.922.289	2.531.981.689	99,96	
2 21 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.532.922.289	2.531.981.689	99,96	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	10.926.859.075	13.388.147.123	122,53	
2 17 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.537.172.775	9.981.960.823	132,44	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD		
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-	#DIV/0!	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	424.999.900	439.999.900	103,53	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-	#DIV/0!	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.107.790.300	1.107.790.300	100,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.081.896.500	1.081.896.500	100,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	774.999.600	776.499.600	100,19	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.012.711.984	4.012.711.984	100,00	
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.012.711.984	4.012.711.984	100,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	21.889.748.853	21.485.418.908	98,15	
2	18	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.426.545.853	19.022.215.908	97,92	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	300.915.000	300.915.000	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	824.918.000	824.918.000	100,00	Dinas Penanaman Modal dan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD		
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
					Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	445.720.000	445.720.000	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	650.294.000	650.294.000	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	241.356.000	241.356.000	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	51.320.336.340	52.975.932.903	103,23	
2	19	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.361.081.340	9.016.677.903	122,49	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	4.726.634.000	4.726.634.000	100,00	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	39.232.621.000	39.232.621.000	100,00	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	659.262.200	659.262.200	100,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD		
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	659.262.200	659.262.200	100,00	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	246.139.200	246.139.200	100,00	
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	246.139.200	246.139.200	100,00	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	12.860.224.751	15.527.171.901	119,27	
2	23	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.860.224.751	15.527.171.901	120,70	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.220.172.000	1.271.172.000	104,18	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARIFAN	1.097.011.000	1.210.786.200	110,37	
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1.097.011.000	1.210.786.200	110,37	Dinas Perpustakaan dan Arsip
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	15.114.290.722	17.228.309.271	113,99	
3	25	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.492.374.955	11.592.893.504	122,13	Dinas Perikanan
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.444.321.200	1.448.821.200	100,31	Dinas Perikanan
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.963.081.067	2.967.581.067	100,15	Dinas Perikanan
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.214.513.500	1.219.013.500	100,37	Dinas Perikanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan		
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.868.334.251	1.893.834.251	101,36	
3 25 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.868.334.251	1.893.834.251	101,36	Dinas Perikanan
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	630.300.000	672.300.000	106,66	
3 25 3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	630.300.000	672.300.000	106,66	Dinas Perikanan
3 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.115.879.100	1.265.879.100	113,44	
3 9 3	PROGRAM PENANCIAN DAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.115.879.100	1.265.879.100	113,44	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 9 4	PROGRAM PENANCIAN KEPRAWANAN PANGAN	311.454.179	311.454.179	100,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 9 5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	99.470.100	99.470.100	100,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	29.800.286.053	32.844.528.207	112,10	
3 27 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.985.152.128	28.900.108.282	115,67	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.074.960.525	2.074.960.525	100,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.015.230.500	1.015.230.500	100,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	527.676.600	527.676.600	100,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3 27 6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	99.634.900	13.820.900	13,87	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD		
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	597.731.400	312.731.400	52,32	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	149.941.300	167.941.300	112,00	
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	149.941.300	167.941.300	112,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	150.000.000	157.500.000	105,00	
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	150.000.000	157.500.000	105,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.920.941.300	2.000.000.000	99,5	
3	27	3	PROGRAM PENYELIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.920.941.300	1.920.941.300	100,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	406.401.900	398.312.000	98,01	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	120.000.100	120.000.100	100,00	
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	120.000.100	120.000.100	100,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	8.290.918.500	8.138.428.500	98,16	
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	149.149.000	153.649.000	103,02	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	47.226.000	41.021.000	86,86	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	317.175.500	367.175.500	115,76	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD		
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	713.035.500	501.750.500	70,37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	7.064.332.500	7.074.832.500	100,15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.451.908.300	14.163.202.088	113,74	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.213.102.900	1.589.916.300	127,90	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	204.102.600	208.612.600	102,20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	122.360.000	122.360.000	100,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	107.175.382.000	107.602.916.040	106,02	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.115.103.375	31.279.994.874	161,53	Sekretariat Daerah
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	50.975.050.137	52.750.436.294	103,48	Sekretariat Daerah
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.730.993.016	3.800.993.016	101,88	Sekretariat Daerah
4	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	71.199.550.466	73.047.738.058	102,60	Sekretariat Daerah
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	52.114.684.700	52.114.684.700	100,00	Sekretariat Daerah
5	1		PERENCANAAN	28.086.421.771	31.869.176.023	113,47	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD		
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
5	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.244.916.953	16.148.285.205	113,36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.731.293.500	1.851.298.500	108,66	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.810.809.518	12.180.695.518	112,67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.299.396.800	1.658.896.800	127,67	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.248.277.700	8.248.277.700	100,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.948.298.900	4.256.298.900	107,80	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	7.929.277.700	8.248.277.700	104,02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD		
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	712.151.265	712.151.265	100,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	681.138.903.841	710.141.921.541	104,26	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5	3		KEPEGAWAIAN	25.496.712.660	27.420.715.897	107,55	
5	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.092.520.660	19.016.590.777	111,26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.092.520.660	19.016.590.777	111,26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.092.520.660	19.016.590.777	111,26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.019.285.400	5.006.302.600	99,74	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	1		INSPEKTORAT DAERAH	30.742.446.974	34.467.522.999	112,12	
6	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.872.809.974	29.808.750.999	110,93	Inspektorat Kabupaten
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.618.467.000	4.407.602.000	121,81	Inspektorat Kabupaten
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	251.170.000	251.170.000	100,00	Inspektorat Kabupaten

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD		
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
7	1		KECAMATAN	472.000.448.740	493.721.266.765	104,60	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.112.322.318	10.127.121.646	111,27	Kecamatan Tigaraksa
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.899.362.863	6.927.862.863	100,41	Kecamatan Tigaraksa
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	573.027.600	579.027.600	101,05	Kecamatan Tigaraksa
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	52.701.000	52.701.000	100,00	Kecamatan Tigaraksa
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	88.160.800	88.160.800	100,00	Kecamatan Tigaraksa
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.125.989.396	1.133.489.396	100,67	Kecamatan Tigaraksa
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	259.022.000	259.022.000	100,00	Kecamatan Tigaraksa
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	79.990.000	79.990.000	100,00	Kecamatan Tigaraksa
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.264.327.400	1.271.827.400	100,59	Kecamatan Tigaraksa
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	240.002.000	240.002.000	100,00	Kecamatan Tigaraksa
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	118.836.000	118.836.000	100,00	Kecamatan Tigaraksa
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.957.060.661	9.596.271.391	107,14	Kecamatan Cikupa
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.960.321.900	6.984.321.900	100,34	Kecamatan Cikupa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD		
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	728.829.300	728.829.300	100,00	Kecamatan Cikupa
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	169.979.200	177.479.200	104,41	Kecamatan Cikupa
7	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	74.239.200	74.239.200	100,00	Kecamatan Cikupa
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	468.234.560	475.734.560	101,60	Kecamatan Cikupa
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	443.395.140	453.895.140	102,37	Kecamatan Cikupa
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.333.862.974	1.337.862.974	100,34	Kecamatan Cikupa
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	52.174.000	52.174.000	100,00	Kecamatan Cikupa
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	582.950.076	582.950.076	100,00	Kecamatan Cikupa
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	197.802.340	202.302.340	102,27	Kecamatan Cikupa
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	878.897.485	878.897.485	100,00	Kecamatan Cikupa
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	48.183.700	48.183.700	100,00	Kecamatan Cikupa
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.906.720.302	7.798.459.302	112,91	Kecamatan Panongan
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.135.590.842	6.135.590.842	100,00	Kecamatan Panongan
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	535.583.200	535.583.200	100,00	Kecamatan Panongan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD		
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	366.599.200	366.599.200	100,00	Kecamatan Panongan
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	62.610.100	62.610.100	100,00	Kecamatan Panongan
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	736.273.916	736.273.916	100,00	Kecamatan Panongan
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.279.694.072	1.279.694.072	100,00	Kecamatan Panongan
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	79.438.000	79.438.000	100,00	Kecamatan Panongan
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.346.063.805	9.700.063.982	104,74	Kecamatan Curug
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	11.157.065.483	11.321.365.483	101,47	Kecamatan Curug
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	501.057.200	531.057.200	106,00	Kecamatan Curug
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	190.883.700	190.883.700	100,00	Kecamatan Curug
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	180.280.000	180.280.000	100,00	Kecamatan Curug
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	625.923.500	646.923.500	103,36	Kecamatan Curug
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	340.080.000	340.080.000	100,00	Kecamatan Curug
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.495.537.459	2.495.537.459	100,00	Kecamatan Curug
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	110.430.000	110.430.000	100,00	Kecamatan Curug

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD		
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	702.850.856	720.850.856	102,56	Kecamatan Curug
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	687.472.900	687.472.900	100,00	Kecamatan Curug
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.035.076.942	2.035.076.942	100,00	Kecamatan Curug
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	148.503.000	148.503.000	100,00	Kecamatan Curug
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	580.717.920	597.217.920	102,84	Kecamatan Curug
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	256.102.400	256.102.400	100,00	Kecamatan Curug
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.014.937.389	2.014.937.389	100,00	Kecamatan Curug
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	86.112.000	86.112.000	100,00	Kecamatan Curug
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.294.202.274	8.736.020.308	106,65	Kecamatan Legok
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.160.644.314	4.184.644.314	100,58	Kecamatan Legok
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	710.516.700	710.516.700	100,00	Kecamatan Legok
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	70.306.000	70.306.000	100,00	Kecamatan Legok
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	73.714.000	73.714.000	100,00	Kecamatan Legok
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	836.642.672	863.642.672	103,23	Kecamatan Legok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD	
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			
7	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	237.442.000	237.442.000	100,00	Kecamatan Legok
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	552.417.756	552.417.756	100,00	Kecamatan Legok
7	1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	109.081.000	109.081.000	100,00	Kecamatan Legok
7	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.873.167.631	12.217.514.776	112,31	Kecamatan Pasar Kemis
7	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.994.389.372	4.372.889.372	109,48	Kecamatan Pasar Kemis
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	730.592.350	730.592.350	100,00	Kecamatan Pasar Kemis
7	1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	59.022.000	59.022.000	100,00	Kecamatan Pasar Kemis
7	1 5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	72.065.000	72.065.000	100,00	Kecamatan Pasar Kemis
7	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	524.400.400	555.102.900	105,85	Kecamatan Pasar Kemis
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.151.486.199	6.125.024.499	99,57	Kecamatan Pasar Kemis
7	1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42.273.700	38.032.900	89,97	Kecamatan Pasar Kemis
7	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	632.971.390	632.971.390	100,00	Kecamatan Pasar Kemis
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.829.007.979	3.829.007.979	100,00	Kecamatan Pasar Kemis
7	1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	36.044.200	36.044.200	100,00	Kecamatan Pasar Kemis

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD	
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			
7	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	420.604.704	420.604.704	100,00	Kecamatan Pasar Kemis
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.657.517.700	3.657.517.700	100,00	Kecamatan Pasar Kemis
7	1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	51.541.800	51.541.800	100,00	Kecamatan Pasar Kemis
7	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.158.427.500	1.158.427.500	100,00	Kecamatan Pasar Kemis
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.881.712.003	4.881.712.003	100,00	Kecamatan Pasar Kemis
7	1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	49.845.600	49.845.600	100,00	Kecamatan Pasar Kemis
7	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.672.790.013	8.414.180.967	109,66	Kecamatan Balaraja
7	1 1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.472.630.000	2.472.630.000	100,00	Kecamatan Balaraja
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	727.573.700	727.573.700	100,00	Kecamatan Balaraja
7	1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	82.900.500	82.900.500	100,00	Kecamatan Balaraja
7	1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	155.860.000	155.860.000	100,00	Kecamatan Balaraja
7	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	568.028.900	577.028.900	101,58	Kecamatan Balaraja
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.010.165.521	1.016.165.521	100,59	Kecamatan Balaraja
7	1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	102.996.000	102.996.000	100,00	Kecamatan Balaraja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD		
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.560.060.689	7.287.536.493	111,09	Kecamatan Kresek
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.332.814.801	3.346.314.801	100,41	Kecamatan Kresek
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	272.252.700	273.352.700	100,00	Kecamatan Kresek
7	1	4	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27.390.000	27.390.000	100,00	Kecamatan Kresek
7	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	129.390.000	129.390.000	100,00	Kecamatan Kresek
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.891.493.023	6.316.493.023	107,21	Kecamatan Kronjo
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.187.937.244	3.970.366.999	124,67	Kecamatan Kronjo
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	274.352.700	274.352.700	100,00	Kecamatan Kronjo
7	1	4	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	129.390.000	129.390.000	100,00	Kecamatan Kronjo
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	234.327.100	234.327.100	100,00	Kecamatan Kronjo
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.433.434.743	8.531.035.303	114,77	Kecamatan Mauk
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.675.640.041	8.166.890.041	122,34	Kecamatan Mauk
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	566.872.800	566.872.800	100,00	Kecamatan Mauk
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	129.390.000	129.390.000	100,00	Kecamatan Mauk

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD	
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			
7	1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	46.380.000	46.380.000	100,00	Kecamatan Mauk
7	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	358.990.390	358.990.390	100,00	Kecamatan Mauk
7	1 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	253.090.390	253.090.390	100,00	Kecamatan Mauk
7	1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.850.000	13.850.000	100,00	Kecamatan Mauk
7	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.002.083.238	7.902.083.238	100,00	Kecamatan Rajeg
7	1 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.766.132.393	5.714.632.393	99,11	Kecamatan Rajeg
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	591.729.390	569.729.390	97,94	Kecamatan Rajeg
7	1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.850.000	13.850.000	100,00	Kecamatan Rajeg
7	1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	62.634.500	62.634.500	100,00	Kecamatan Rajeg
7	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	508.297.800	526.297.800	103,54	Kecamatan Rajeg
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.671.249.694	2.671.249.694	100,00	Kecamatan Rajeg
7	1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.850.000	13.850.000	100,00	Kecamatan Rajeg
7	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.902.083.238	8.289.037.785	104,90	Kecamatan Sepatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD	
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			
7	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.682.668.793	4.696.668.793	100,30	Kecamatan Sepatan
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	674.849.340	676.849.340	100,30	Kecamatan Sepatan
7	1 4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.094.200	13.094.200	100,00	Kecamatan Sepatan
7	1 5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	75.165.200	75.165.200	100,00	Kecamatan Sepatan
7	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	506.283.000	506.283.000	101,11	Kecamatan Sepatan
7	1 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.078.949.275	1.078.949.275	100,00	Kecamatan Sepatan
7	1 3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.501.600	32.501.600	100,00	Kecamatan Sepatan
7	1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.065.271.122	9.065.271.122	107,51	Kecamatan Telukkraga
7	1 5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.065.271.122	8.065.271.122	100,00	Kecamatan Telukkraga
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	526.007.700	526.007.700	100,00	Kecamatan Teluknaga
7	1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	98.948.000	98.948.000	100,00	Kecamatan Teluknaga
7	1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	127.120.000	127.120.000	100,00	Kecamatan Teluknaga
7	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.958.626.384	7.522.283.027	108,10	Kecamatan Cisoka
7	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.332.351.088	5.360.851.088	100,53	Kecamatan Cisoka

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD	
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	483.088.070	483.088.070	100,00	Kecamatan Cisoka
7	1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	203.480.400	203.480.400	100,00	Kecamatan Cisoka
7	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.948.782.814	7.054.629.098	110,16	Kecamatan Pakuhaji
7	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.613.192.336	6.658.378.820	100,82	Kecamatan Pakuhaji
	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	429.363.100	429.363.100	100,00	Kecamatan Pakuhaji
	1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	120.000,00	120.000,00	100,00	Kecamatan Pakuhaji
7	1 3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	103.363.500	103.363.500	100,00	Kecamatan Pakuhaji
7	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	400.000,000	400.000,000	100,00	Kecamatan Pakuhaji
	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.221.847,100	1.221.847,100	100,00	Kecamatan Pakuhaji
7	1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	70.571.200	70.571.200	100,00	Kecamatan Pakuhaji
7	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.927.277.191	11.791.191.592	107,91	Kecamatan Kosambi
7	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.545.162.207	7.545.162.207	100,00	Kecamatan Kosambi
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	644.109.800	644.109.800	100,00	Kecamatan Kosambi
7	1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	216.846.900	216.846.900	100,00	Kecamatan Kosambi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD		
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	188.820.000	188.820.000	100,00	Kecamatan Kosambi
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	928.481.100	928.481.100	100,00	Kecamatan Kosambi
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	787.091.500	787.091.500	100,00	Kecamatan Kosambi
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	51.884.000	51.884.000	100,00	Kecamatan Kosambi
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	818.573.350	818.573.350	100,00	Kecamatan Kosambi
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	842.050.116	842.050.116	100,00	Kecamatan Kosambi
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	61.281.000	61.281.000	100,00	Kecamatan Kosambi
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	692.174.900	692.174.900	100,00	Kecamatan Kosambi
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	692.174.900	692.174.900	100,00	Kecamatan Kosambi
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	75.384.000	75.384.000	100,00	Kecamatan Kosambi
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.481.677.988	9.847.394.288	103,86	Kecamatan Pagedangan
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.992.921.260	5.173.021.260	103,61	Kecamatan Pagedangan
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	692.174.900	729.614.900	105,41	Kecamatan Pagedangan
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	209.043.300	159.063.300	76,09	Kecamatan Pagedangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD	
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			
7	1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	173.169.540	168.879.540	97,52	Kecamatan Pagedangan
7	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.132.197.000	1.132.197.000	102,17	Kecamatan Pagedangan
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.561.730.000	1.597.102.000	102,08	Kecamatan Pagedangan
7	1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	31.500.000	31.500.000	100,00	Kecamatan Pagedangan
7	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.427.186.102	6.776.305.073	105,44	Kecamatan Jambe
7	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.354.376.017	3.372.376.017	100,54	Kecamatan Jambe
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	725.007.100	725.007.100	100,00	Kecamatan Jambe
7	1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	31.099.000	31.099.000	100,00	Kecamatan Jambe
7	1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	90.123.000	90.123.000	100,00	Kecamatan Jambe
7	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.092.254.752	5.668.907.235	111,32	Kecamatan Jayanti
7	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.663.314.334	3.691.814.334	100,78	Kecamatan Jayanti
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	894.429.400	894.429.400	100,00	Kecamatan Jayanti
7	1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	70.099.000	70.099.000	100,00	Kecamatan Jayanti
7	1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	90.123.000	90.123.000	100,00	Kecamatan Jayanti

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD	
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			
7	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.886.464.204	6.022.585.536	102,31	Kecamatan Kemiri
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.037.540.000	1.040.800.000	100,70	Kecamatan Kemiri
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	510.529.000	510.529.000	100,00	Kecamatan Kemiri
7	1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	171.272.000	171.272.000	100,00	Kecamatan Kemiri
	1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100.900.000	100.900.000	100,00	Kecamatan Kemiri
7	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.256.477.364	6.913.992.660	110,51	Kecamatan Sukadiri
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.833.414.156	3.870.414.156	100,47	Kecamatan Sukadiri
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	732.791.100	732.791.100	100,00	Kecamatan Sukadiri
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	218.316.100	218.316.100	100,00	Kecamatan Sukadiri
7	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.753.977.672	8.463.997.879	109,16	Kecamatan Cisauk
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.847.464.685	6.857.964.685	100,15	Kecamatan Cisauk
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	675.593.940	658.862.520	97,52	Kecamatan Cisauk
7	1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	36.957.900	36.957.900	100,00	Kecamatan Cisauk

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD		
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	123.429.900	123.429.900	100,00	Kecamatan Cisauk
7	1	1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH	123.429.900	123.429.900	100,00	Kecamatan Cisauk
7	1	3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN KAP DESA DAN KELURAHAN	589.817.000	589.817.000	100,00	Kecamatan Cisauk
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	81.533.600	81.533.600	100,00	Kecamatan Cisauk
7	1	1	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.915.042.943	6.549.190.431	110,54	Kecamatan Sepatan Timur
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.024.115.000	3.143.215.000	100,60	Kecamatan Sepatan Timur
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	737.567.000	737.567.900	100,00	Kecamatan Sepatan Timur
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	141.807.000	141.807.000	100,00	Kecamatan Sepatan Timur
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	138.590.000	138.590.000	100,00	Kecamatan Sindang Jaya
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.595.213.203	6.314.983.163	112,86	Kecamatan Sindang Jaya
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.535.527.558	3.570.027.558	100,98	Kecamatan Sindang Jaya
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	982.592.920	982.592.920	100,00	Kecamatan Sindang Jaya
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	153.879.000	153.879.000	100,00	Kecamatan Sindang Jaya
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	138.590.000	138.590.000	100,00	Kecamatan Sindang Jaya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD		
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.595.399.231	15.471.244.204	106,00	Kecamatan Kelapa Dua
7	1	3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.191.573.000	9.191.573.000	100,00	Kecamatan Kelapa Dua
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KABUPATEN/KOTA	64.450.000	64.450.000	100,00	Kecamatan Kelapa Dua
7	1	6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.750.000	11.750.000	100,00	Kecamatan Kelapa Dua
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.000.000	1.000.000	100,00	Kecamatan Kelapa Dua
7	1	2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	531.500.000	531.500.000	100,00	Kecamatan Kelapa Dua
7	1	3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.572.000	1.572.000	100,00	Kecamatan Kelapa Dua
7	1	4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	64.450.000	64.450.000	100,00	Kecamatan Kelapa Dua
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	516.595.700	516.595.700	100,00	Kecamatan Kelapa Dua
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	511.500.000	511.500.000	100,00	Kecamatan Kelapa Dua
7	1	3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	651.674.457	651.674.457	100,00	Kecamatan Kelapa Dua
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KABUPATEN/KOTA	64.450.000	64.450.000	100,00	Kecamatan Kelapa Dua
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	640.068.900	640.068.900	100,00	Kecamatan Kelapa Dua

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan		
7	1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	909.600.000	909.600.000	100,00	Kecamatan Kelapa Dua
7	1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	641.716.866	641.716.866	100,00	Kecamatan Kelapa Dua
7	1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	53.850.000	53.850.000	100,00	Kecamatan Kelapa Dua
7	1 1 PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	610.077.100	610.077.100	100,00	Kecamatan Kelapa Dua
7	1 2 PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.787.362.320	2.841.362.320	101,94	Kecamatan Solear
7	1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	318.835.600	318.835.600	100,00	Kecamatan Solear
7	1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	53.850.000	53.850.000	100,00	Kecamatan Kelapa Dua
7	1 1 PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6213.111.100	6.171.070.100	100,63	Kecamatan Solear
7	1 2 PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.787.362.320	2.841.362.320	101,94	Kecamatan Solear
7	1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	318.835.600	318.835.600	100,00	Kecamatan Solear

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD		
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	197.381.000	197.381.000	100,00	Kecamatan Solear
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	197.381.000	197.381.000	100,00	Kecamatan Solear
7	1	3	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN	6.333.225	6.333.229,943	115,45	Kecamatan Mekar Baru
7	1	3	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN	1.033.230.000	1.033.283.000	100,00	Kecamatan Mekar Baru
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	186.315.400	186.315.400	100,00	Kecamatan Mekar Baru
7	1	6	DESA	99.999.380	99.999.380	100,00	Kecamatan Mekar Baru
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.171.522.610	5.105.653.626	98,73	Kecamatan Sukamulya
7	1	2	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERTAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.541.900.000	4.541.900.000	100,31	Kecamatan Sukamulya
7	1	3	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN	529.002.800	529.002.800	100,00	Kecamatan Sukamulya
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	78.366.000	78.366.000	100,00	Kecamatan Sukamulya
7	1	0	DESA	1.700.000	1.700.000	100,00	Kecamatan Sukamulya
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.675.060.597	5.317.651.226	113,75	Kecamatan Gunung Kaler
7	1	2	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.917.458.889	3.987.178.889	101,78	Kecamatan Gunung Kaler

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		%	OPD		
		APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	913.319.292	822.939.292	90,10	Kecamatan Gunung Kaler
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	913.319.292	822.939.292	90,10	Kecamatan Gunung Kaler
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	73.165,00	73.165,00	100,00	Kecamatan Gunung Kaler
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.927.160,00	14.842.160,00	50,73	Kecamatan Gunung Kaler
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.713.779.792	3.955.034,28	106,52	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.868.820.152	3.981.843.160	102,92	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.654.563.500	5.654.563.500	100,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	170.000.000	16.930.000	99,53	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	150.000.000	150.000.000	100,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	883.000.000	883.000.000	100,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcomes* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcomes*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Indikator kinerja daerah ini merupakan target kepala daerah yang harus dicapai dan didukung Perangkat Daerah yang merupakan target selama lima tahun dalam RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019–2023, target ditetapkan dan dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Adapun indikator makro sebagai tujuan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah terlihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No.	Uraian Indikator Makro	Satuan	Capaian				Target	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	LPE	Persen	5,84	5,93	5,88	-3,7	5,1	5,21
2	Inflasi	Persen	3,46	2,42	3,31	1,17	0,69	3,30
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	10,57	9,70	8,91	13,6	11,5	8,8
4	Kemiskinan	Persen	5,39	5,18	5,14	6,23	6,1	7
5	IPM	Nilai	70,97	71,59	71,93	71,92	71,52	72,82

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang diolah, 2022

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan. Indikator utama Bupati tersebut, merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari

indikator kinerja program yang bersifat *outcomes* yang dilaksanakan OPD. Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan OPD merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*outputs*) yang dilaksanakan OPD. Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Perumusan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya yang digunakan Pemerintah yang diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja utama Bupati disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program OPD disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati dan pelayanan yang harus dilaksanakan OPD. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019-2023 yang telah direncanakan, dimana tahun 2017 merupakan tahun dasar, tahun 2018 merupakan tahun transisi dan indikatornya ada yang sudah dirilis ada pula yang belum dirilis BPS, tahun 2019 merupakan tahun pertama RPJMD dan tahun 2022 merupakan tahun ke-4 RPJMD. Indikator-indikator kinerja tersebut dituangkan dalam tabel 6.2 berikut ini.

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tangerang
Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja			Target	
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Ketentraman dan ketertiban Masyarakat	Indeks	70*		74	1,06	1,07
Angka Harapan Hidup	tahun	69,64	69,79	69,89	69,89	70,08
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	8,27	8,28	8,39	8,61	8,45
Prosentase Penduduk Miskin	Persen	5,18	5,14	6,23	7,12	5,15
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,93	5,88	-3,7	3,07	5,21
Nilai AKIP	Nilai	62,3	70,3	71	71,37	71,99
Indeks Kepuasan	Indeks	80,01	83,66	86,36	81	83

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja			Target	
		2018	2019	2020	2021	2022
Masyarakat						
Prosentase Infrastruktur Wilayah dalam kondisi baik	Persen	85		89	91	93
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	48.90*	47,57	52	54,7	55,2
Indeks Inovasi Daerah	Indeks	-	-	25	56	68

Tabel 6.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang Tahun 2022

Indikator Outcome	Satuan	Target		Penanggung jawab
		2021	2022	
1	2	3	4	5
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
Pertumbuhan PDRB	Persen	4,63	5,21	Bappeda
Laju inflasi	Persen	0,69	3.30	Bappeda
PDRB per kapita	Juta Rp	44,089	37,09	Bappeda
Indeks Gini	Persen	0,294	0,24	Bappeda
Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Persen	1.03	1.00	Bappeda
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	94.94	94.98	Bappeda
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,29	72,82	Bappeda
Angka melek huruf	Persen	97,24	98,68	Bappeda
Angka rata-rata lama sekolah	Persen	8,61	8,60	Dinas Pendidikan
Angka usia harapan hidup	Persen	69,93	71,47	Bappeda
Persentase balita gizi buruk	Persen	0,64	0,56	Dinas Kesehatan
Prevalensi balita gizi kurang	Persen	2,34	2,89	Dinas Kesehatan
Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	86,12	86,42	Dinas Kesehatan
Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	63,95	66,93	Dinas Tenaga Kerja
Tingkat pengangguran terbuka	Persen	9,06	8,8	Dinas Tenaga Kerja
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persen	27.70	26.70	Dinas Sosial
Indeks Kepuasan Masyarakat		81	83	Sekretariat Daerah
Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	42,74	49,85	Badan Pendapatan Daerah
Opini BPK	Opini BPK	WTP	WTP	BPKAD

Indikator Outcome	Satuan	Target		Penanggung jawab
		2021	2022	
1	2	3	4	5
Penguatan cadangan pangan	Ton	18.725	26.635,23	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	-0,84	6,64	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Produksi sektor pertanian	Ton Gkp	837,768.00	927,768.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pertumbuhan Industri	Persen	2,95	2,95	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
ASPEK DAYA SAING DAERAH				
Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (Indikator keterbukaan ekonomi)	Persen	1,28	68,62	Bappeda
Rasio ketergantungan	Persen	0.4112	44,06	Bappeda
ASPEK PELAYANAN UMUM				
Layanan Urusan Wajib Dasar				
Pendidikan				Dinas Pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	21,07	51	Dinas Pendidikan
APK SD./MI	Persen	104.8	100	Dinas Pendidikan
APK SMP/MTs	Persen	77.59	93,56	Dinas Pendidikan
APT SD/MI	Persen	25.57	28.57	Dinas Pendidikan
APT SMP/MTs	Persen	10.64	11.64	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	94,61	100	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	54,53	83,41	Dinas Pendidikan
Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	99,83	100	Dinas Pendidikan
Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	97,90	98,69	Dinas Pendidikan
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,03	0,02	Dinas Pendidikan
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,03	0,03	Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	Dinas Pendidikan
	jumlah	1488		

Indikator Outcome	Satuan	Target		Penanggung jawab
		2021	2022	
1	2	3	4	5
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	Dinas Pendidikan
	Jumlah	1341		
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	85,93	98,09	Dinas Pendidikan
	Jumlah	9952		
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	114,93	84,18	Dinas Pendidikan
	Jumlah	320		
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Nilai	28	0,04	Dinas Pendidikan
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Nilai	29	0,04	Dinas Pendidikan
Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Nilai	0.033	0.005	Dinas Pendidikan
Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Nilai	0.037	0.005	Dinas Pendidikan
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	19,36	20,36	Dinas Pendidikan
Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	96,85	96,88	Dinas Pendidikan
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	97,24	96,88	Dinas Pendidikan
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	90,70	94,22	Dinas Pendidikan
Kesehatan				
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Bayi	251	158	Dinas Kesehatan
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Jiwa	78	38	Dinas Kesehatan
Rasio posyandu per satuan balita	Nilai	0,791	0,58	Dinas Kesehatan
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Nilai	0,656	0,164	Dinas Kesehatan
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Nilai	0.0000082	0,0064	Dinas Kesehatan
Rasio dokter per	Persen	0,837	0,036	Dinas

Indikator Outcome	Satuan	Target		Penanggung jawab
		2021	2022	
1	2	3	4	5
satuan penduduk				Kesehatan
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	80,6	100	Dinas Kesehatan
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	101,5	100	Dinas Kesehatan
Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Persen	95,2	96,9	Dinas Kesehatan
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	95,08	96,07	Dinas Kesehatan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
	Nilai	0,21		
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
Penderita diare yang ditangani	Persen	69,2	100	Dinas Kesehatan
Cakupan kunjungan bayi	Persen	0	0	Dinas Kesehatan
Cakupan puskesmas	Persen	102,4	100	Dinas Kesehatan
Cakupan pembantu puskesmas	Persen	28,59	32,88	Dinas Kesehatan
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	20,7	21,74	Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan nifas	Persen	99	100	Dinas Kesehatan
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	99	100	Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan anak balita	Persen	80,2	100	Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	98,2	100	Dinas Kesehatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Pekerjaan Umum:				
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	770,76	89,41	Dinas Bina Marga dan SDA
Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	94,6	95,73	Dinas Bina Marga dan SDA
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	69,52	74,52	Dinas Bina Marga dan SDA
Persentase areal kawasan kumuh	Persen	29,66	29,56	Dinas Perkim
Penataan Ruang:				

Indikator Outcome	Satuan	Target		Penanggung jawab
		2021	2022	
1	2	3	4	5
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Persen	97,61	98,17	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	17,05	17,06	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Persen	99,11	99,11	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
Rasio rumah layak huni	Persen	94,01	93,33	Dinas Perkim
	Nilai	855.802		
Sosial				
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	Persen	99,95	99,96	Dinas Sosial
	Nilai	217.423		
Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
Tenaga Kerja				Dinas Tenaga Kerja
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	45,99	17,73	Dinas Tenaga Kerja
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	100	100	Dinas Tenaga Kerja
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	55,2	55,6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	14,4	14,56	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	22,83	24,01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	16,7	21,07	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persen	99,41	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA

Indikator Outcome	Satuan	Target		Penanggung jawab
		2021	2022	
1	2	3	4	5
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persen	97,4	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persen	96,4	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Persen	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA
Pangan				
Ketersediaan pangan utama	Ton	18.725	488.048,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kalori	141.106	146.084	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Gram/perkapita/Hari	76.113		
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	100.00	100.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pertanahan				
Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	16,35	21,35	Dinas Perkim
Penyelesaian izin lokasi	Persen	100	100	Dinas Tata Ruang dan Bangunan
Lingkungan Hidup				
Timbulan sampah yang ditangani	Persen	39,00	25,63	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	91,21	93,72	Disdukcapil
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
Persentase PKK aktif	Persen	100	100	DPMPD
Persentase Posyandu aktif	Persen	93,11	93,83	DPMPD
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				

Indikator Outcome	Satuan	Target		Penanggung jawab
		2021	2022	
1	2	3	4	5
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,47	2,83	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,4	2,42	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/ indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	Persen	68.24	73.57	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	45	45	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	1,52	1,51	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	68,36	68,74	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Tahun	41,91	40,18	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	6,36	6,19	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persen	26,44	21,47	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	24,54	24,48	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	16,05	16,8	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	87,99	88,3	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Indikator Outcome	Satuan	Target		Penanggung jawab
		2021	2022	
1	2	3	4	5
satuan penduduk				Kesehatan
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	80.6	100	Dinas Kesehatan
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	101.5	100	Dinas Kesehatan
Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	Persen	95.2	96,9	Dinas Kesehatan
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	95,08	96,07	Dinas Kesehatan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	100	100	Dinas Kesehatan
	Nilai	0,21		
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100.00	100.00	Dinas Kesehatan
Penderita diare yang ditangani	Persen	69,2	100	Dinas Kesehatan
Cakupan kunjungan bayi	Persen	0	0	Dinas Kesehatan
Cakupan puskesmas	Persen	102,4	100	Dinas Kesehatan
Cakupan pembantu puskesmas	Persen	28,59	32,88	Dinas Kesehatan
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	20,7	21,74	Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan nifas	Persen	99	100	Dinas Kesehatan
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	99	100	Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan anak balita	Persen	80,2	100	Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	98.2	100	Dinas Kesehatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Pekerjaan Umum:				
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	770.76	89,41	Dinas Bina Marga dan SDA
Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	94,6	95,73	Dinas Bina Marga dan SDA
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	69,52	74,52	Dinas Bina Marga dan SDA
Persentase areal kawasan kumuh	Persen	29,66	29,56	Dinas Perkim
Penataan Ruang:				

Indikator Outcome	Satuan	Target		Penanggung jawab
		2021	2022	
1	2	3	4	5
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	98,65	99	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	96,94	97,37	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	24,02	25,68	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	86,27	88,01	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	98,46	98,64	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	42	42	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota	Persen	650,06	650,73	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes	Persen	452,3	452,97	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	220,7	221,37 100	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Jumlah	100		
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	94	94,1	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Indikator Outcome	Satuan	Target		Penanggung jawab
		2021	2022	
1	2	3	4	5
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	98,39	99,06	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	16,94	15,61	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Rata-rata usia kawin pertama wanita	Usia Rata-Rata	42	42	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen	3,64	4,62	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan		29	29	Dinas Komunikasi dan Informatika
Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah				Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase koperasi aktif	Persen	60,44	64,63	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	93,97	94,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Penanaman Modal				Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	3.596	6.215	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rupiah	4.434.684,18	20.36	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	7,66	6,8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepemudaan dan Olahraga				Disporabudpar
Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persen	85	60	Disporabudpar

Indikator Outcome	Satuan	Target		Penanggung jawab
		2021	2022	
1	2	3	4	5
Persentase Wirausaha Muda	Persen	70	63	Disporabudpar
Cakupan Pembinaan Olahraga	persen	75	38	Disporabudpar
Cakupan Pembinaan Atlet Muda	persen	75	22	Disporabudpar
Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	4	22	Disporabudpar
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi		100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
Buku Kabupaten Dalam angka		100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
Buku PDRB		1	1	Dinas Komunikasi dan Informatika
Kebudayaan				Disporabudpar
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	11	13	Disporabudpar
Perpustakaan				
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	65,25	66	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Jumlah	15.582		
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen		80	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	Jumlah	112.147		
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Buah	57.432	68.12	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kearsipan				
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	65,25	66	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	1.00	1.00	Dinas Perpustakaan dan Arsip
Pariwisata				
Kunjungan wisata	Persen	27.129	31.092	Disporabudpar
Pertanian				
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	-0,84	6,64	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Indikator Outcome	Satuan	Target		Penanggung jawab
		2021	2022	
1	2	3	4	5
Perdagangan				
Ekspor Bersih Perdagangan	Milyar	2,476,782,756,000	19,009,391	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Perindustrian				
Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	12,92	13,9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kelautan dan Perikanan				
Produksi perikanan	Ton	21,030,670	119.03	Dinas Perikanan
Konsumsi ikan	Persen	37,44	105.8	Dinas Perikanan
Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	33,64	38,38	Dinas Perikanan
Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen		31.47	Dinas Perikanan
	Ton	4,398		
Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	97,73	98,23	Dinas Perikanan
Nilai tukar nelayan	Persen	110,21	110,48	Dinas Perikanan
Perencanaan Pembangunan				
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Bappeda
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Bappeda
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Bappeda
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Bappeda
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	Bappeda
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	Bappeda
Keuangan				
Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	BPKAD
Persentase SILPA	Persen	18.70	18.65	BPKAD

Indikator Outcome	Satuan	Target		Penanggung jawab
		2021	2022	
1	2	3	4	5
Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	8,48%	4,66%	BPKAD
Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	0,43	0,38	BPKAD
Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	614.192,02	606.290,11	BPKAD
Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	307.096,01	303.145,06	BPKAD
Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Persen	3,32	3,19	BPKAD
Belanja Langsung	Persen	76,53%	75,85%	BPKAD
Belanja Tidak Langsung	Persen	23,05%	23,75%	BPKAD
Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Persen	14,01%	13,90%	BPKAD
Penetapan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD
Pengawasan				
Persentase tindak lanjut temuan Sekretariat Dewan	Persen	83,54	85,54	Inspektorat
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ya/tidak	Ada	Ada	Sekretariat DPRD
Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ya/tidak	Ada	Ada	Sekretariat DPRD
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ya/tidak	Ada	Ada	Sekretariat DPRD

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, dalam penyusunan RKPD tahun 2022 didasari pada arah kebijakan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintah daerah, sebagai berikut :

Tabel 6.4
Target Indikator Kinerja Berdasarkan Urusan

No	Kinerja	Indikator	Target
		Kab/Kota	
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tercapainya penerapan kebijakan Merdeka Belajar di daerah	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	47,2 4%
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	25,56%
2	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	100%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	100%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	100%
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Rumah Sakit Rujukan	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	1:1000 Rasio Penduduk
		Persentase rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi	90%
4	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil. 2. Pelayanan kesehatan ibu melahirkan. 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4. Pelayanan Kesehatan Balita 5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	100%
5	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	205/100.000
		Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	15%
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	91%
		Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	18,4%
		Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	7,5
		Insidensi TB per 100.000	231/100.

No	Kinerja	Indikator	Target
		Kab/Kota	
(1)	(2)	(3)	(4)
		penduduk	000
		Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak rerinfeksi HIV	0,19
		Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	90%
		Treatment coverage pada pasien TB	90%
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	71%
		Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	59%
		Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	8,9%
		Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	40%
		Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	90%
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	49%
		Persentase Sarana Produksi UMOT	60%
7	Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air	Persentase luas sawah beririgasi	54%
		Luas jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun	4.125 Ha ³
		Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	143.826,2 Ha
		Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	25 Km
8	Tersedianya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	95,9%
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	27,1%
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	10%
		Persentase PDAM dengan kinerja sehat	83,6%

No	Kinerja	Indikator	Target
		Kab/Kota	
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman)
		Persentase angka BABS di tempat terbuka	2,98%
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang	75,28% penanganan; 9,13% pengurangan
9	Terwujudnya konektivitas jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	72%/62%
		Pembangunan Jalan daerah mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, KSPN, Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	50 Km
10	Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang	Penyelesaian Materi Teknis dari Bantuan Teknis RDTR	394 Materi Teknis
		Pelaksanaan dan Pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR	1122 Persetujuan Substansi
		Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW	125 Materi Teknis
		Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RDTR	1153 Materi Teknis
11	Terciptanya pengendalian pemanfaatan ruang di DAS pada wilayah sungai	Jumlah objek penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) (DAS diluar kawasan hutan)	2 DAS
		Pelaksanaan Fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruag di kawasan sekitar SDEW (DAS diluar kawasan hutan)	2 DAS
		Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah	18 6 kab/kota
12	Terciptanya kepatuhan Pemanfaatan Ruang pada Sawah yang terlindungi	Pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah	18 6 kab/kota
		Pelaksanaan fasilitasi penertiban alih fungsi lahan sawah	15 1 kab/kota

No	Kinerja	Indikator	Target
		Kab/Kota	
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%
14	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	5779 Ha
15	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	81702 Unit
16	Meningkatnya penyediaan FSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100%
17	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
		Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	75%
18	Meningkatnya manajemen bencana yang terintergrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase penanganan pra bencana	100 %
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %
		Persentase penanganan pasca bencana	100 %
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %
19	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100 %
		Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	50%
		Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	50%
20	Tersedianya Data Fakir Miskin	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	60 %

No	Kinerja	Indikator	Target
		Kab/Kota	
(1)	(2)	(3)	(4)
		Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	3000 orang
		Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	7230 orang
		Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	100 %
21	Penguatan Pelaksanaan	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	150 Badan Usaha
22	Perlindungan Sosial	Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin	7000 KPM
		Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	10,000,000 KPM
		Peningkatan kapasitas pendamping PKH	150 orang
		Peningkatan kapasitas pendamping PKH	8000 orang
		Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos	4000 lembaga
		Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Kesos	18000 orang
23	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	350,000 jiwa
		Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	250,000 jiwa
		Jumlah Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	358 kelompok masyarakat
		Jumlah Kelompok Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Mendapatkan Pencegahan Konflik Sosial	375 kelompok masyarakat
		Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	120.000 orang
		Jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian yang Siap Ditugaskan	1,200 orang
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	3,60 %

No	Kinerja	Indikator	Target
		Kab/Kota	
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	24 %
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	0,53 %
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	20.51 %
24	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial dan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala	19-20%
25	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	17.800 Orang
26	Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Jumlah Pekerja yang meningkat produktivitasnya	1.189.550 Orang
		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri	12.000 Orang
27	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Meningkat minimal 25% dari kondisi 2020
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	85%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkat minimal 2 poin dari kondisi 2020
28	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Meningkat minimal 3% dari kondisi 2020
		Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	70%

No	Kinerja	Indikator	Target
		Kab/Kota	
(1)	(2)	(3)	(4)
29	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Persentase cadangan pangan masyarakat	10%
		Persentase daerah rentan rawan pangan	14%
		Skor Pola Pangan Harapan	92,8%
30	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	85%
31	Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	129523 Kepala Keluarga
		Jumlah bidang tanah yang didistribusi	423421 bidang
32	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	42422 Hektar
33	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.22 Poin
34	Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	1700 Lembaga %
35	Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota, meliputi: a. Jumlah pengurangan timbulan sampah b. Jumlah penanganan timbulan sampah	11,18 31,40
36	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	100%
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	97 %
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian	100 %

No	Kinerja	Indikator	Target
		Kab/Kota	
(1)	(2)	(3)	(4)
42	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	85.00 (Nilai)
		<i>On Time Performance</i> Layanan Transportasi	78.44 %
43	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Rasio Konektivitas Nasional	0.695 Rasio
44	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan	28.85 Rasio
45	Tersedianya Infrastruktur Digital	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	80%
46	Terlaksananya Layanan	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung	65%
		Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	65%
48	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk pertumbuhan ekonomi	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	30%
		Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	100%
49	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Masyarakat di bidang digital	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	200 orang
		Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	200%
50	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi	Persentase (%) konten informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah	70%
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	70%
		Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	70%

No	Kinerja	Indikator	Target
		Kab/Kota	
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	75%
51	Terwujudnya Koperasi yang Modern	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	50%
52	Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	50%
53	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	Tercapainya Realisasi Penanaman Modal	Rp. 968.400.0 00.000.00 0
54	Meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	6.69% (Persen)
55	Meningkatnya pemuda yang berwirausaha	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.55% (Persen)
56	Meningkatnya prestasi olahraga nasional dan internasional	Peningkatan prestasi olahraga	12 (Medali emas)
57	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %
58	Menguatnya kemandirian siber lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	100 Orang
		Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	5 Daerah
		Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	100 Orang
59	Terwujudnya Kelestarian Cagar Budaya	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai	36 %

No	Kinerja	Indikator	Target
		Kab/Kota	
(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	4,156 Unit
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	36 %
		Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	460 Unit
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	.96 % ¹
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12 %
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	400 Unit
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum (DAK)	13 Unit ¹
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	50 Orang
		Pembentukan tim ahli cagar budaya Provinsi	50 Orang
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	36%
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	12%
		Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	0.31%
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1.96%
		Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	22.33%

No	Kinerja	Indikator	Target
		Kab/Kota	
(1)	(2)	(3)	(4)
60	Literasi masyarakat meningkat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13 (Index)
61	Tingkat kegemaran membaca masyarakat bertambah	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	63,3 (Nilai)
62	Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	148. 880 Arsip
		Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	170.362 Orang
63	Terwujudnya industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi Perikanan Tangkap	8.320.00 0 ton
		Produksi Perikanan Budidaya	20.540.00 0 ton
64	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	1.398.00 0.000.00 0
		Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	260.000.0 00-2 80.000.00 0)
		Kontribusi PDB Pariwisata	4.3%
65	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)	2,00%
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah)	1,20%
		Persentase peningkatan produktivitas perkebunan	3,28%
		persentase peningkatan produktivitas peternakan	1,20%
66	Terkendalnya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Tanaman Pangan = 95% Hortikultura = 90-95% Perkebunan = 80%
		Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	80,5%

No	Kinerja	Indikator	Target
		Kab/Kota	
(1)	(2)	(3)	(4)
67	Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air		100000 Ha
68	Meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat		250000 Ha
69	Meningkatnya Jumlah Desa yang Teraliri Listrik		100%
70	Meningkatnya Penggunaan Energi yang Bersumber dari Energi Baru Terbarukan		15.7%
71	Meningkatnya Rumah Tangga yang Teraliri Listrik		100%
71	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	5,96% - 7.86%
72	Terwujudnya iklim usaha yang kondusif	Tertib Usaha	55% – 75%
73	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	42%
74	Meningkatnya kepastian penyaluran pupuk /pestisida bersubsidi sesuai ketentuan jenis, jumlah, waktu, harga, mutu dan tempat	Persentase kinerja realisasi pupuk	90%
75	Meningkatnya jaminan mutu komoditas potensial daerah	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	5 0- 7 5 %
76	Meningkatnya keberdayaan dan kepercayaan konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	91%

No	Kinerja	Indikator	Target
		Kab/Kota	
(1)	(2)	(3)	(4)
77	Terwujudnya kecukupan bahan pangan untuk masyarakat	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	5.9%
78	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan	Inflasi Pangan berkejang	3%-5%
79	Tercapainya Peningkatan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	6.8%
80	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	18.3%
81	Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	151.9 (Nilai)
82	Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	20.6 juta
83	Terwujudnya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	425.3 Triliun
84	Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	53.12 (Index)
		Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	42.03 (Index)

BAB VII
PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Tangerang disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan baik yang menjadi penjabaran atas Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJAPD) Tahun 2020.
2. Perubahan RKPD Tahun 2022 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD, maka perlu dilaksanakan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah periode berikutnya.

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR